

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BPR BKK WONOGIRI (PERSERODA)
TAHUN 2025**



**JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah
TELEPON: 0273 322214 - 0273 322747**



1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BKK WONOGIRI (Perseroda)
Alamat	JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah
Nomor Telepon	(0273) 322214

Penjelasan Umum:

Secara umum PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) telah berupaya untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan menerapkan prinsip TARIF diantaranya dengan melakukan komunikasi dan koordinasi baik pada jajaran pengurus maupun pegawai. Namun kami menyadari bahwa upaya yang kami lakukan masih jauh dari sempurna sehingga pengurus selalu berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan amanat regulasi, berikut kami sajikan Laporan penerapan Tata Kelola PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) yang disusun untuk memenuhi Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang merujuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat. Penjabaran dari penerapan tata kelola pada PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) sebagaimana tersaji dalam Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2025 ini.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola	
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut akan segera diperbaiki pada periode penerapan tata kelola kedepan. Terhadap belum terpenuhinya struktur Komisaris Independen dan Komite Dewan Komisaris, Direksi berkomitmen untuk mengkomunikasikan hal tersebut dengan Pemegang Saham dan untuk saat ini sedang berlangsung proses pengisian Komisaris Independen.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	SARTI, SE.MM
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab: TUGAS : - Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Perusahaan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. - Menyusun perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (bisnis plan dan corporate plan). - Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi. - Melakukan pembinaan dan pengendalian semua unit kerja pada perusahaan. TANGGUNG JAWAB - Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan. - Mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan ketentuan. - Menetapkan tata tertib Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Mewakili Perusahaan baik di dalam ataupun di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Perusahaan. - Membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	



6. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik Perusahaan berdasarkan ketentuan.
7. Menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik Perusahaan berdasarkan ketentuan.
8. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga atas nama Perusahaan.
9. Wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Perusahaan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
10. Wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

2.	Nama	YANI HARMINI, SP
----	------	------------------

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

TUGAS

1. Membantu Direktur Utama memimpin koordinasi dalam kegiatan umum dan operasional, keuangan, kepatuhan, perencanaan dan pengembangan serta tugas lain demi meningkatkan kinerja/produktifitas serta sesuai dengan tujuan Perusahaan.
2. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Perusahaan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Menyusun rencana Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang di bidang non Pemasaran.
4. Mengkoordinir dan mengorganisir bidang non pemasaran dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan.
5. Mengelola Sumber Daya Manusia dan Aset Tetap Inventaris perusahaan.
6. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
7. Menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya serta Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan dan pedoman penyusunan laporan Perusahaan yang berlaku.

TANGGUNG JAWAB

1. Membentuk satuan/unit kerja, tim dan/atau komite sesuai kebutuhan perusahaan.
2. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan.
3. Menetapkan tata tertib perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau menghapus melepaskan hak aktiva tetap dan inventaris berdasarkan ketentuan.
5. Membentuk Satuan/ Unit Kerja, Badan Pertimbangan, Tim dan/ atau Komite sesuai kebutuhan Perusahaan.
6. Menetapkan kebijakan dan mengendalikan bidang umum, SDM, TI, Perencanaan dan Pelaporan serta bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko termasuk APU dan PPT.
7. Menetapkan kebijakan umum, kepegawaian dan kedisiplinan pegawai, penghasilan pengurus dan pegawai, pensiun dan lain- lain bersama Direktur Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Memonitor dan memastikan target perusahaan tercapai dengan efisien.
9. Menyusun Rencana Bisnis secara realistis.

3.	Nama	JOKO SANTOSO, SE
----	------	------------------

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

TUGAS

1. Membantu Direktur Utama memimpin koordinasi dalam kegiatan pemasaran produk perbankan, baik dana dan kredit serta tugas lain demi meningkatkan kinerja/produktifitas serta sesuai dengan tujuan Perusahaan.
2. Menerapkan Tata Kelola pada pelaksanaan operasional bidang pemasaran di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Menyusun rencana Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang di bidang Pemasaran.
4. Mengkoordinir dan mengorganisir bidang pemasaran dan kantor operasional dalam kegiatan operasional perusahaan.
5. Melakukan riset dan pengembangan produk.



6. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
7. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kepada OJK, kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat.

TANGGUNG JAWAB

1. Menetapkan sasaran dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemasaran produk dan jasa Perusahaan.
2. Menetapkan kebijakan dalam administrasi kredit dan dana serta pengendalian terhadap bidang pemasaran.
3. Menetapkan produk dan layanan serta melakukan inovasi, baik dalam organisasi maupun operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Merekomendasikan/mengusulkan penyelesaian pinjaman bermasalah melalui jalur hukum dengan tetap berpedoman pada prinsip cost and benefit.
5. Melakukan pelaksanaan pengawasan dalam penghimpunan dan pengelolaan dana Perusahaan.
6. Menetapkan suku bunga yaitu suku bunga Pinjaman, Antar Kantor, Simpanan, Antar Bank Pasiva dan tarif jasa lainnya.
7. Memonitor perkembangan suku bunga, kegiatan pemasaran produk dan jasa perusahaan serta mengusulkan kebijakan bidang pemasaran.
8. Melakukan inovasi dan perbaikan pemasaran kredit, dana dan produk layanan lainnya serta teknologi pemasarannya.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

1. Telah dilakukan sosialisasi terkait APU, PPT, dan PPPSPM dan Strategi Anti Fraud pada semester 2 tahun 2025
2. Telah dilakukan mutasi secara bertahap dan pengawasan melekat kepada setiap pegawai secara berjenjang.
3. Telah dilaksanakan pengawasan melekat kepada seluruh pegawai dengan memantau kondisi keuangan melalui laporan SLIK dan telah dilakukan pembinaan untuk pegawai dengan kecenderungan pemanfaatan Paylater dan memiliki kredit bermasalah. Hal tersebut merupakan pendektesian awal guna penerapan strategi anti fraud di lingkungan Perusahaan.
4. Telah dilakukan pengkinian kebijakan dan SOP sesuai dengan peraturan yang berlaku
5. Pada semester 2 tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa kali agenda Literasi dan Inklusi keuangan, yaitu kegiatan goes to school pada 10 sekolah dan sosialisasi kepada 3 kelompok masyarakat
6. Telah dilaksanakan mutasi pegawai dan pengangkatan pejabat struktural untuk mengisi kekosongan pejabat dengan memperhatikan kompetensi calon pejabat pengganti
7. Perusahaan akan terus memperbaiki kinerja terutama penyelesaian kredit bermasalah dan laporan action plan penurunan NPL telah disampaikan ke OJK setiap bulan.
8. Perusahaan telah melakukan penyesuaian terkait Ketentuan Internal Tata Kelola dengan Peraturan Direksi No. 10/XII/Per.Dir/2025 tentang Penerapan Tata Kelola
9. Perusahaan telah melakukan penyesuaian terkait ketentuan Struktur Organisasi dengan Keputusan Direksi Nomor 80/X/Kep.Dir/2025 tentang Struktur Organisasi.
10. Pelaksanaan komitmen tindak lanjut pemeriksaan umum OJK telah ditindaklanjuti, namun masih terdapat 2 (dua) temuan yang masih dalam proses yaitu:
 - a. Pemenuhan Komisaris Independen masih dalam proses penjangkaran dan menunggu arahan dari Pemegang Saham
 - b. Pemenuhan Komite Dewan Komisaris akan dilaksanakan pada saat Konsolidasi PT BPR BKK (Perseroda) Se Jawa Tengah.
11. Laporan action plan penurunan NPL telah disampaikan ke OJK setiap bulan.

Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan secara umum sebagian besar rekomendasi dari Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Andre Wahyu Yudhantoro, SE, MM
----	------	--------------------------------

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB



1. Memimpin kegiatan anggota Dewan Komisaris.
2. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemegang Saham.
3. Memimpin rapat Dewan Komisaris.
4. Menetapkan pembagian tugas para anggota Dewan Komisaris.

2.	Nama	FX. Pranata, AP., M.Hum
----	------	-------------------------

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Membantu Komisaris Utama dalam melaksanakan tugas.
2. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Komisaris Utama.

Rekomendasi Kepada Direksi:

1. Untuk dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini secara berkala kepada pegawai menyangkut hal teknis agar setiap pegawai memiliki pengetahuan yang cukup.
2. Terkait tindak lanjut dan komitmen kepada OJK maupun KAP agar dijadikan perhatian dan dilaksanakan sesuai komitmen.
3. Untuk dilakukan pengawasan kepada SDM antara lain dengan mutasi antar kantor. Namun dapat juga dilakukan rotasi bidang tugas pada internal kantor. Terus laksanakan pengawasan melekat kepada setiap pegawai secara berjenjang. Jika diperlukan dapat dilaksanakan dengan metode coaching maupun mentoring
4. Untuk dilakukan pengawasan melekat kepada seluruh pegawai antara lain dengan memantau kondisi keuangan melalui laporan SLIK. Lakukan pembinaan untuk pegawai dengan kecenderungan pemanfaatan Paylater dan kredit bermasalah.
5. Perubahan regulasi agar diikuti dengan pengkinian kebijakan dan SOP.
6. Kegiatan inklusi keuangan untuk terus dilaksanakan secara berkala dengan sasaran selain sekolah juga pada kelompok kelompok tertentu yang ada pada Masyarakat. Kegiatan inklusi keuangan dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait agar lebih efektif dan efisien.
7. Untuk dilaksanakan mutasi pegawai dan pengangkatan pejabat struktural untuk mengisi kekosongan pejabat dengan memperhatikan kompetensi calon pejabat pengganti sehingga pelaksanaan operasional Perusahaan berjalan sebagaimana mestinya.
8. Untuk dilakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan laporan action plan terhadap kantor cabang dengan NPL dan KKR yang besar.
9. Melakukan pengkinian kebijakan internal Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan ketentuan OJK.
10. Melakukan perubahan struktur organisasi untuk memenuhi Komite Audit serta Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan Regulasi terkini
11. Melaksanakan tindak lanjut terhadap Konfirmasi Hasil Pemeriksaan OJK tahun 2025 sesuai dengan komitmen yang sudah disepakati
12. Action Plan penurunan LAR agar dilaporkan ke OJK setiap bulan, sesuai dengan komitmen.

Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan secara umum sebagian besar rekomendasi telah ditindaklanjuti Direksi. Rekomendasi Dewan Komisaris tertuang dalam Notulen Rapat yang diselenggarakan bersama dengan anggota Direksi dengan rutinitas paling sedikit satu bulan sekali.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

1.	Komite	02. Komite Pemantau Risiko
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab	Membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan penerapan Manajemen Risiko pada Perusahaan.
	Jumlah Rapat	4
	Program Kerja Komite: Melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	
	Realisasi Program Kerja Komite: Melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	



Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

BPR memiliki Komite Pemantau Risiko, namun belum membentuk komite lainnya, proses pemenuhan Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi akan dilaksanakan pada saat konsolidasi PT BPR BKK (Perseroda) Se Jawa Tengah.

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Daftar Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		
1.	Nama Anggota Komite	Yudhi Rengga Setiawan, S.STP.,M.M
	Keahlian	Memiliki kemampuan manajemen risiko, memiliki sertifikat kompetensi Manajemen Risiko Level 5
	Jabatan Dalam Komite Audit	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	02. Anggota Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak Independen?	1. Ya

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

1. Melakukan pemantauan risk appetite dan risk tolerance.
2. Melakukan monitoring berkala terhadap kredit, posisi likuiditas, dan agunan khususnya kendaraan bermotor dengan audit nilai ekonomis dan kondisi fisik secara berkala.
3. Penyesuaian terhadap ketentuan baru.
4. Pemberian kredit dilakukan analisis dengan memperhatikan repayment capacity.

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR		
1.	Nama	SARTI, SE.MM
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	YANI HARMINI, SP
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
3.	Nama	JOKO SANTOSO, SE
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR		
1.	Nama	Andre Wahyu Yudhantoro, SE, MM
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	FX. Pranata, AP., M.Hum
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00



7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR		
1.	Nama	SARTI, SE.MM
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	YANI HARMINI, SP
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
3.	Nama	JOKO SANTOSO, SE
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR		
1.	Nama	Andre Wahyu Yudhantoro, SE, MM
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	FX. Pranata, AP., M.Hum
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain		
1.	Nama	SARTI, SE.MM
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00



2.	Nama	YANI HARMINI, SP
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
3.	Nama	JOKO SANTOSO, SE
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Andre Wahyu Yudhantoro, SE, MM
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	FX. Pranata, AP., M.Hum
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	SARTI, SE.MM
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	JOKO SANTOSO, SE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	YANI HARMINI, SP
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada



Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Andre Wahyu Yudhantoro, SE, MM
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	FX. PRANATA, AP, M.Hum
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dengan sesama Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.
Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dengan sesama Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Pemegang Saham.

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	SARTI, SE.MM
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	JOKO SANTOSO, SE
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	YANI HARMINI, SP
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota	Tidak ada



	Direksi Lain di BPR	
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	ANDRE WAHYU YUDHANTORO, SE, MM
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	FX. PRANATA, AP., M.Hum
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan sesama Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan sesama Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Pemegang Saham.

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp308.505.600
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp445.914.720

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp1.301.742.000



Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp0

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp302.966.241
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp102.926.835

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp800.976.527
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp227.104.632

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris	Rp0



(Rp)	
------	--

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp0

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

1. Remunerasi lainya terdiri dari Tunjangan Hari Raya (THR) dan penghargaan target kinerja yang diberikan berdasarkan ketentuan perusahaan dan dianggarkan dalam RBB.
2. Penetapan penghasilan Direksi dan Komisaris telah mendapatkan persetujuan RUPS LB Tanggal 29 November 2024 dengan agenda RUPS LB pengesahan RBB Tahun anggaran 2025.

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah	
Rasio (a/b)	4,80 : 1



2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah	
Rasio (a/b)	1,25 : 1

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	
Rasio (a/b)	1,25 : 1

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	
Rasio (a/b)	2,50 : 1

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi	
Rasio (a/b)	3,40 : 1

Rasio gaji dihitung berdasarkan gaji beserta semua tunjangan yang diterima selama 1 tahun.

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	04 Januari 2025
	Jumlah Peserta	5 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi kinerja Triwulan IV Tahun 2024, Kesiapan implementasi SAKEP dan pembentukan CKPN	

2.	Tanggal Rapat	22 Februari 2025
	Jumlah Peserta	5 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi kinerja bulan Januari Tahun 2025 dan Pembahasan Lain	

3.	Tanggal Rapat	15 Mei 2025
	Jumlah Peserta	5 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi kinerja bulan Februari Tahun 2025 dan Pembahasan Lain	

4.	Tanggal Rapat	12 April 2025
	Jumlah Peserta	19 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi kinerja Triwulan I Tahun 2025	

5.	Tanggal Rapat	24 Mei 2025
	Jumlah Peserta	5 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi kinerja bulan April Tahun 2025 dan Pembahasan lain	



	Tanggal Rapat	18 Juni 2025
	Jumlah Peserta	10 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Perubahan RBB 2025	
7.	Tanggal Rapat	19 Juli 2025
	Jumlah Peserta	9 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi kinerja Triwulan II Tahun 2025	
8.	Tanggal Rapat	25 Agustus 2025
	Jumlah Peserta	5 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi Kinerja bulan Juli 2025	
9.	Tanggal Rapat	29 September 2025
	Jumlah Peserta	5 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi Kinerja bulan Agustus 2025	
10.	Tanggal Rapat	25 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	10 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi kinerja Triwulan III Tahun 2025	
11.	Tanggal Rapat	18 November 2025
	Jumlah Peserta	20 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rencana Bisnis Bank Tahun 2026	
12.	Tanggal Rapat	01 Desember 2025
	Jumlah Peserta	12 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi Kinerja bulan November 2025	

Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dengan Direksi pada tahun 2025 dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun		
1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Andre Wahyu Yudhantoro, SE, MM
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	12 kali hadir



	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	FX. Pranata, AP, M.Hum
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	12 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Pada tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (duabelas) kali dengan tingkat kehadiran

a. Komisaris utama menghadiri 12 (duabelas) pertemuan

b. Komisaris menghadiri sebanyak 12 (duabelas) kali pertemuan

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus
1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus



Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus
---	---------

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Tidak terdapat fraud pada tahun 2025



16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai	
Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian	
Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	1 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus

Terdapat gugatan perdata dimana PT BPR BKK Wonogiri (Perseroda) menjadi turut tergugat 1 dikarenakan SHM yang menjadi objek sengketa saat ini menjadi agunan di PT BPR BKK Wonogiri (Perseroda).

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada tahun 2025.

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik		
1.	Tanggal Pelaksanaan	10 Januari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Anak Yatim
	Penjelasan Kegiatan	Pembukaan Tabungan Simpel Ayah_KC 03
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	14 Januari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Anak Yatim
	Penjelasan Kegiatan	Pembukaan Tabungan Simpel Ayah_KC 09
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	16 Januari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Sembako HUT Merger



	Jumlah (Rp)	Rp33.000.000
4.	Tanggal Pelaksanaan	22 Januari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Anak Yatim
	Penjelasan Kegiatan	Pembukaan Tabungan Simpel Ayah_KC 09
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
5.	Tanggal Pelaksanaan	30 Januari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PWRI Kabupaten Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan PWRI Kabupaten Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
6.	Tanggal Pelaksanaan	30 Januari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panti Wredha Kabupaten Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Panti Wredha Kabupaten Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
7.	Tanggal Pelaksanaan	30 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	BAZDA Kabupaten Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan BAZDA Kabupaten Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
8.	Tanggal Pelaksanaan	30 Januari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Pondok Pesantren
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Pondok Pesantren
	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000
9.	Tanggal Pelaksanaan	03 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Korban Banjir Kabupaten Pekalongan
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Kepada Korban Banjir Kabupaten Pekalongan
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
10.	Tanggal Pelaksanaan	13 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial



	Penerima Dana	Masjid Al Muttaqin (Sidoharjo)
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Pembangunan Masjid Al Muttaqin (Sidoharjo)
	Jumlah (Rp)	Rp5.000.000
11.	Tanggal Pelaksanaan	19 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Peserta Lomba TPA Se Kabupaten Wonogiri melalui LAZIS
	Penjelasan Kegiatan	Partisipasi Lomba TPA Se Kabupaten Wonogiri melalui LAZIS
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
12.	Tanggal Pelaksanaan	19 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masjid Majelis Ta'lim Masjid An Nur Yassin Kec. Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	ZIS Masjid Majelis Ta'lim Masjid An Nur Yassin Kec. Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
13.	Tanggal Pelaksanaan	24 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PWRI Kabupaten Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan PWRI Kabupaten Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
14.	Tanggal Pelaksanaan	24 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panti Wredha Kabupaten Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Panti Wredha Kabupaten Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
15.	Tanggal Pelaksanaan	24 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	BAZDA Kabupaten Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan BAZDA Kabupaten Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
16.	Tanggal Pelaksanaan	24 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Pondok Pesantren



	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Pondok Pesantren
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
17.	Tanggal Pelaksanaan	27 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Mukena & Sajadah dalam rangka Bln. Ramadhan
	Jumlah (Rp)	Rp4.050.000
18.	Tanggal Pelaksanaan	06 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Pembagian Takjil Masjid At Taqwa Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
19.	Tanggal Pelaksanaan	07 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Kegiatan Ramadhan KPO dan Kantor Cabang
	Jumlah (Rp)	Rp42.000.000
20.	Tanggal Pelaksanaan	12 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Pembagian Takjil Ramadhan
	Jumlah (Rp)	Rp13.000.000
21.	Tanggal Pelaksanaan	19 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Penyandang Disabilitas
	Penjelasan Kegiatan	ZIS Yayasan Krida Karya (Disabilitas)
	Jumlah (Rp)	Rp100.000
22.	Tanggal Pelaksanaan	27 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panti Asuhan Putri Aisyiah Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Panti Asuhan Putri Aisyiah Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp3.000.000
23.	Tanggal Pelaksanaan	21 Maret 2025



	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Anak Yatim Sidokroyo Ngadirojo
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Anak Yatim Sidokroyo Ngadirojo (2 anak)
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
24.	Tanggal Pelaksanaan	21 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Bp. Hartanto (Joho Lor Giriwono)
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Pengobatan Bp. Hartanto
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
25.	Tanggal Pelaksanaan	25 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Pembagian Takjil Ramadhan (Kerjasama POLRES Wonogiri)
	Jumlah (Rp)	Rp5.924.000
26.	Tanggal Pelaksanaan	25 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Anak Yatim
	Penjelasan Kegiatan	Pembukaan Tabungan Simpel Ayah_KPO
	Jumlah (Rp)	Rp600.000
27.	Tanggal Pelaksanaan	26 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PWRI Kabupaten Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan PWRI Kabupaten Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
28.	Tanggal Pelaksanaan	26 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panti Wredha Kabupaten Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Panti Wredha Kabupaten Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
29.	Tanggal Pelaksanaan	26 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	BAZDA Kabupaten Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan BAZDA Kabupaten Wonogiri



	Jumlah (Rp)	Rp500.000
30.	Tanggal Pelaksanaan	26 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Pondok Pesantren
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Pondok Pesantren
	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000
31.	Tanggal Pelaksanaan	26 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Anak Yatim
	Penjelasan Kegiatan	Pembukaan Tabungan Simpel Ayah_KPO
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
32.	Tanggal Pelaksanaan	28 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Penyandang Disabilitas
	Penjelasan Kegiatan	ZIS Disabilitas(UPCKRS,KWST,Federasi Kesejahteraan Disabilitas)
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
33.	Tanggal Pelaksanaan	28 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Penyandang Disabilitas
	Penjelasan Kegiatan	ZIS Disabilitas (Omah Forum Aspirasi Disabilitas)
	Jumlah (Rp)	Rp100.000
34.	Tanggal Pelaksanaan	08 April 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Penyandang Disabilitas
	Penjelasan Kegiatan	ZIS Disabilitas (KUBPCM & KUBC)
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
35.	Tanggal Pelaksanaan	09 April 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Penyandang Disabilitas
	Penjelasan Kegiatan	ZIS Disabilitas (KPCBK & IPPC)
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
36.	Tanggal Pelaksanaan	14 April 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial



	Penerima Dana	Masyarakat Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Pembagian Paket Sembako (BPR Berbagi CFD Giritontro)
	Jumlah (Rp)	Rp680.000
37.	Tanggal Pelaksanaan	15 April 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Mushola Nurul Qolbhi Purwantoro
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Pembangunan Mushola Nurul Qolbhi Purwantoro
	Jumlah (Rp)	Rp3.000.000
38.	Tanggal Pelaksanaan	23 April 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Anak Yatim
	Penjelasan Kegiatan	Pembukaan Tabungan Simpel Ayah_KC 07
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
39.	Tanggal Pelaksanaan	24 April 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PWRI Kabupaten Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan PWRI Kabupaten Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
40.	Tanggal Pelaksanaan	24 April 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panti Wredha Kabupaten Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Panti Wredha Kabupaten Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
41.	Tanggal Pelaksanaan	24 April 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	BAZDA Kabupaten Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan BAZDA Kabupaten Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
42.	Tanggal Pelaksanaan	24 April 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Pondok Pesantren
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Pondok Pesantren



	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000
43.	Tanggal Pelaksanaan	19 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Kambing Kurban (melalui BAZNAS Kab. Wonogiri)
	Jumlah (Rp)	Rp3.000.000
44.	Tanggal Pelaksanaan	20 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Penyandang Disabilitas
	Penjelasan Kegiatan	ZIS Disabilitas (PCTF Bina Kami)
	Jumlah (Rp)	Rp100.000
45.	Tanggal Pelaksanaan	27 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Anak Yatim
	Penjelasan Kegiatan	Pembukaan Tabungan Simpel Ayah_KPO
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
46.	Tanggal Pelaksanaan	30 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PWRI Kabupaten Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan PWRI Kabupaten Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
47.	Tanggal Pelaksanaan	30 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panti Wredha Kabupaten Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Panti Wredha Kabupaten Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
48.	Tanggal Pelaksanaan	30 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	BAZDA Kabupaten Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan BAZDA Kabupaten Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
49.	Tanggal Pelaksanaan	30 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial



	Penerima Dana	Pondok Pesantren
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Pondok Pesantren
	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000
50.	Tanggal Pelaksanaan	31 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masjid Al Barokah Baturetno
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Pembangunan Masjid Al Barokah Baturetno
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
51.	Tanggal Pelaksanaan	31 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Mushola Al Ikhlas Jeporo Jatipurno
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Hewan Kurban (Mushola Al Ikhlas Jeporo Jatipurno)/1 ekor sapi
	Jumlah (Rp)	Rp28.000.000
52.	Tanggal Pelaksanaan	02 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Anak Yatim
	Penjelasan Kegiatan	Pembukaan Tabungan Simpel Ayah_KPO
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
53.	Tanggal Pelaksanaan	04 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masjid Al Barokah Sabuk Gunungsari Jatisrono
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Hewan Kurban Masjid Al Barokah Sabuk Gunungsari Jatisrono/7 ekor kambing
	Jumlah (Rp)	Rp24.500.000
54.	Tanggal Pelaksanaan	13 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Pengadaan Pompa Banjir sayung
	Jumlah (Rp)	Rp7.000.000
55.	Tanggal Pelaksanaan	18 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Rehabilitasi Balai Desa Sonoharjo Wonogiri



	Jumlah (Rp)	Rp2.500.000
56.	Tanggal Pelaksanaan	23 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat Terdampak Bencana Dsn. Garon, Jatipurwo, Jatipurno
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Logistik Rumha Terdampak Bencana Dsn. Garon, Jatipurwo, Jatipurno)
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
57.	Tanggal Pelaksanaan	25 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Siswa Kurang Mampu MTs Al Iman Ngadirojo (An. Rizki)
	Penjelasan Kegiatan	Pemberian Bantuan Siswa Kurang Mampu MTs Al Iman Ngadirojo
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
58.	Tanggal Pelaksanaan	25 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PWRI Kabupaten Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan PWRI Kabupaten Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
59.	Tanggal Pelaksanaan	25 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panti Wredha Kabupaten Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Panti Wredha Kabupaten Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
60.	Tanggal Pelaksanaan	25 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	BAZDA Kabupaten Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan BAZDA Kabupaten Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
61.	Tanggal Pelaksanaan	25 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Pondok Pesantren
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Pondok Pesantren
	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000



62.	Tanggal Pelaksanaan	25 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masjid Al Akbar Dsn Ngasem Kec. Nguntoronadi
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Renovasi Masjid Al Akbar Dsn Ngasem Kec. Nguntoronadi
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
63.	Tanggal Pelaksanaan	03 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	10 Orang Anak Yatim
	Penjelasan Kegiatan	Partisipasi Program Baznas Kabupaten Wonogiri Yatim Bahagia
	Jumlah (Rp)	Rp5.000.000
64.	Tanggal Pelaksanaan	03 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Anak Yatim
	Penjelasan Kegiatan	Pembukaan Tabungan Simpel Ayah KC Batuwarno
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
65.	Tanggal Pelaksanaan	04 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Yayasan Selamat Sejahtera Gonilan Kartasura Sukoharjo
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Kepada Yayasan Selamat Sejahtera Gonilan Kartasura Sukoharjo
	Jumlah (Rp)	Rp7.500.000
66.	Tanggal Pelaksanaan	07 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	TPA Masjid Al Huda Trukan Pracimantoro
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Speaker Aktif TPA Masjid Al Huda Trukan Pracimantoro
	Jumlah (Rp)	Rp1.770.000
67.	Tanggal Pelaksanaan	07 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	32 Anak Yatim
	Penjelasan Kegiatan	Santunan Anak Yatim Masjid Al Mukmin Polres Wonogiri berupa bantuan alat sekolah
	Jumlah (Rp)	Rp810.400



68.	Tanggal Pelaksanaan	10 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Anak Yatim
	Penjelasan Kegiatan	Pembukaan Tabungan Simpel Ayah KC Baturetno
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
69.	Tanggal Pelaksanaan	18 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	3 Orang Anak
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Pendidikan melalui Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp3.000.000
70.	Tanggal Pelaksanaan	22 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	7 (tujuh) Kepala Keluarga di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Jamban untuk 7 (tujuh) Kepala Keluarga di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri @Rp6.370.000,00
	Jumlah (Rp)	Rp44.590.000
71.	Tanggal Pelaksanaan	28 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PWRI Kabupaten Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan PWRI Kabupaten Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
72.	Tanggal Pelaksanaan	29 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panti Wredha Kabupaten Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Panti Wredha Kabupaten Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
73.	Tanggal Pelaksanaan	30 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	BAZDA Kabupaten Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan BAZDA Kabupaten Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
74.	Tanggal Pelaksanaan	30 Juli 2025



	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Anak Yatim
	Penjelasan Kegiatan	Pembukaan Tabungan Simpel Ayah KC Giritontro
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
75.	Tanggal Pelaksanaan	31 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Pondok Pesantren Al Ibanah 2
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Pondok Pesantren Al Ibanah 2
	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000
76.	Tanggal Pelaksanaan	31 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Anak Yatim
	Penjelasan Kegiatan	Pembukaan Tabungan Simpel Ayah KC Ngadirojo
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
77.	Tanggal Pelaksanaan	31 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	2 (dua) orang Anak Yatim
	Penjelasan Kegiatan	Pembukaan Tabungan Simpel Ayah KC Girimarto
	Jumlah (Rp)	Rp600.000
78.	Tanggal Pelaksanaan	05 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Anak Yatim
	Penjelasan Kegiatan	Pembukaan Tabungan Simpel Ayah KC Girimarto
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
79.	Tanggal Pelaksanaan	12 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Anak Yatim
	Penjelasan Kegiatan	Pembukaan Tabungan Simpel Ayah KC Purwantoro
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
80.	Tanggal Pelaksanaan	14 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panti Wredha
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Renovasi Ruang Layanan Panti Wredha
	Jumlah (Rp)	Rp5.000.000



81.	Tanggal Pelaksanaan	15 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Anak Yatim MTs N 3 Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Santunan Anak Yatim MTs N 3 Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp3.300.000
82.	Tanggal Pelaksanaan	19 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Anak Yatim
	Penjelasan Kegiatan	Pembukaan Tabungan Simpel Ayah KC Tirtomoyo
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
83.	Tanggal Pelaksanaan	21 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan 200 paket sembako dalam rangka HUT RI Ke 80
	Jumlah (Rp)	Rp27.737.750
84.	Tanggal Pelaksanaan	03 September 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Anak Yatim
	Penjelasan Kegiatan	Pembukaan Tabungan Simpel Ayah KC Giritontro
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
85.	Tanggal Pelaksanaan	17 September 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PWRI Kabupaten Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan PWRI Kabupaten Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
86.	Tanggal Pelaksanaan	17 September 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panti Wredha Kabupaten Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Panti Wredha Kabupaten Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
87.	Tanggal Pelaksanaan	17 September 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	BAZDA Kabupaten Wonogiri



	Penjelasan Kegiatan	Bantuan BAZDA Kabupaten Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
88.	Tanggal Pelaksanaan	17 September 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Pondok Pesantren Al Ibanah 2
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Pondok Pesantren Al Ibanah 2
	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000
89.	Tanggal Pelaksanaan	23 September 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Mushola Al Firdaus SD N 2 Pokoh Kidul
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Renovasi Mushola Al Firdaus SD N 2 Pokoh Kidul
	Jumlah (Rp)	Rp3.000.000
90.	Tanggal Pelaksanaan	24 September 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	2 (dua) orang Anak Yatim
	Penjelasan Kegiatan	Pembukaan Tabungan Simpel Ayah KPO
	Jumlah (Rp)	Rp600.000
91.	Tanggal Pelaksanaan	24 September 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Anak Yatim
	Penjelasan Kegiatan	Pembukaan Tabungan Simpel Ayah KC Purwantoro
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
92.	Tanggal Pelaksanaan	26 September 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	UMKM Disabilitas
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan UMKM Disabilitas "Ubi Madu Ariel" Ngadirojo
	Jumlah (Rp)	Rp5.000.000
93.	Tanggal Pelaksanaan	03 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Anak Yatim
	Penjelasan Kegiatan	Pembukaan Tabungan Simpel Ayah KC Giritontro
	Jumlah (Rp)	Rp300.000



94.	Tanggal Pelaksanaan	13 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Sekolah Tani Ngadirojo
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Bibit Sekolah Tani Ngadirojo
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
95.	Tanggal Pelaksanaan	22 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Paket Sembako dalam rangka Undian Spektamades (100 paket)
	Jumlah (Rp)	Rp13.956.550
96.	Tanggal Pelaksanaan	24 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	SD Kepatihan II Selogiri
	Penjelasan Kegiatan	Pembagian Jum'at Berkah Nasi Box SD Kepatihan II Selogiri
	Jumlah (Rp)	Rp1.045.000
97.	Tanggal Pelaksanaan	27 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masjid Baitussalam Watuleter Girimarto
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Untuk Masjid Baitussalam Watuleter Girimarto
	Jumlah (Rp)	Rp3.000.000
98.	Tanggal Pelaksanaan	27 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Kelompok Tani Ngudi Makmur (Dsn Janglot, Ds. Baturetno, Kec. Baturetno)
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Sumur Pantek Kelompok Tani Ngudi Makmur (Dsn Janglot, Ds. Baturetno, Kec. Baturetno)
	Jumlah (Rp)	Rp40.000.000
99.	Tanggal Pelaksanaan	27 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Kelompok Tani Parang Subur (Dsn Ngelo, Ds. Semin, Kec. Nguntoronadi)
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Sumur Pantek Kelompok Tani Parang Subur (Dsn Ngelo, Ds. Semin, Kec. Nguntoronadi)



	Jumlah (Rp)	Rp40.000.000
100	Tanggal Pelaksanaan	27 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	An. Sarwito (Gembol 2/1 Kedungombo Baturetno)
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) An. Sarwito (Gembol 2/1 Kedungombo Baturetno)
	Jumlah (Rp)	Rp15.000.000
101	Tanggal Pelaksanaan	27 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	An. Suhardiyanto (Ngledok 3/2 Balepanjang Baturetno)
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) An. Suhardiyanto (Ngledok 3/2 Balepanjang Baturetno)
	Jumlah (Rp)	Rp15.000.000
102	Tanggal Pelaksanaan	27 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	An. Miftakul Ghomam (Duwet Lor 1/6 Baturetno)
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) An. Miftakul Ghomam (Duwet Lor 1/6 Baturetno)
	Jumlah (Rp)	Rp15.000.000
103	Tanggal Pelaksanaan	27 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Kelompok Pedagang Sektor Selatan (Baturetno)
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan UMKM Kelompok Pedagang Sektor Selatan (Baturetno)
	Jumlah (Rp)	Rp10.000.000
104	Tanggal Pelaksanaan	27 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	UMKM WUB Berkah Pangan (Ngadirojo)
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan UMKM WUB Berkah Pangan (Ngadirojo)
	Jumlah (Rp)	Rp10.000.000
105	Tanggal Pelaksanaan	27 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	UMKM Srikandi Bangsri (Purwantoro)
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan UMKM Srikandi Bangsri (Purwantoro)



	Jumlah (Rp)	Rp10.000.000
106	Tanggal Pelaksanaan	27 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	An. Hartuti (Kaloran Giritirto Wonogiri)
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) An. Hartuti (Kaloran Giritirto Wonogiri)
	Jumlah (Rp)	Rp10.000.000
107	Tanggal Pelaksanaan	31 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PWRI Kabupaten Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan PWRI Kabupaten Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
108	Tanggal Pelaksanaan	31 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panti Wredha Kabupaten Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Panti Wredha Kabupaten Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
109	Tanggal Pelaksanaan	31 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	BAZDA Kabupaten Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan BAZDA Kabupaten Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
110	Tanggal Pelaksanaan	31 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Pondok Pesantren Al Ibanah 2
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Pondok Pesantren Al Ibanah 2
	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000
111	Tanggal Pelaksanaan	13 November 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	SD N 1 Ngadirojo
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Untuk Mushola Miftahul Jannah SD N 1 Ngadirojo
	Jumlah (Rp)	Rp3.000.000
112	Tanggal Pelaksanaan	14 November 2025



	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	An. Bp. Romadhon (Dsn. Badran Batuwarno)
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Renovasi Rumah Korban Kebakaran An. Bp. Romadhon (Dsn. Badran Batuwarno)
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
113	Tanggal Pelaksanaan	26 November 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	10 (sepuluh) orang anak yatim
	Penjelasan Kegiatan	Pembukaan Tabungan Simpel Ayah KPO
	Jumlah (Rp)	Rp3.000.000
114	Tanggal Pelaksanaan	29 November 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat Sumbar
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Banjir Sumbar
	Jumlah (Rp)	Rp4.000.000
115	Tanggal Pelaksanaan	04 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat Aceh dan Sumatera
	Penjelasan Kegiatan	Donasi Untuk Aceh dan Sumatera melalui PMI Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp3.000.000
116	Tanggal Pelaksanaan	15 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masjid Al Huda Girimarto
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Pembangunan Teras Masjid Al Huda Girimarto
	Jumlah (Rp)	Rp3.000.000
117	Tanggal Pelaksanaan	15 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PWRI Kabupaten Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan PWRI Kabupaten Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
118	Tanggal Pelaksanaan	15 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panti Wredha Kabupaten Wonogiri



	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Panti Wredha Kabupaten Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
119	Tanggal Pelaksanaan	15 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	BAZDA Kabupaten Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan BAZDA Kabupaten Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
120	Tanggal Pelaksanaan	15 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Pondok Pesantren Al Ibanah 2
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Pondok Pesantren Al Ibanah 2
	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000
121	Tanggal Pelaksanaan	16 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat Dusun Cangkring Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Kebakaran Dusun Cangkring Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri
	Jumlah (Rp)	Rp3.000.000
122	Tanggal Pelaksanaan	17 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Pedagang Pasar Wonogiri Kota
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Kebakaran Pasar Wonogiri Kota
	Jumlah (Rp)	Rp34.000.600

Selama tahun 2025 telah dilaksanakan 122 (seratus dua puluh dua) kegiatan sosial dengan total bantuan sebesar Rp572.410.125,- yang bersumber dari dana CSR, ZIS, dan Jumat berkah.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wonogiri, 21 Januari 2025

PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)



Andre Wahyu Yudhantoro, S.E., M.M
Komisaris Utama

Menyetujui



Sarti, SE, MM
Direktur Utama



KESIMPULAN UMUM
HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
SEMESTER I TAHUN 2025

Nama BPR : PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
Alamat : JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah
Nomor Telepon : 0273 322214 - 0273 322747
Posisi Laporan : Semester I Tahun 2025
Modal Inti : Rp75.936.721.686
Total Aset : Rp715.681.057.811

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 2 (Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 2 (Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 4 (Kurang Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Nilai 4 (Kurang Memadai)
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 2 (Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 2 (Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 2 (Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 2 (Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 2 (Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 2 (Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 2 (Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 2 (Memadai)
Peringkat Komposit		2
Predikat Komposit		Baik



Kesimpulan
Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.
Faktor Positif
A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur
1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham dengan pencapaian terpenuhi secara keseluruhan. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan. 3. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan dengan pencapaian terpenuhi secara keseluruhan. 4. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan. 5. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPR berada dalam kondisi terpenuhi secara keseluruhan. 6. Implementasi struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern di BPR menunjukkan kondisi terpenuhi secara keseluruhan. 7. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan. 8. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan. 9. BPR telah mengimplementasikan struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan. 10. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola
1. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham dengan penilaian memadai. 2. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR berada dalam kondisi memadai. 3. Proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR saat ini dinilai memadai. 4. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite berjalan dengan cukup memadai. 5. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan yang dinilai memadai. 6. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan yang dinilai cukup memadai. 7. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern yang dimiliki BPR dinilai memadai. 8. Penilaian terhadap proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dimiliki BPR adalah memadai. 9. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dimiliki BPR dinilai memadai. 10. Proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit dinilai memadai. 11. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dengan pencapaian memadai. 12. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR dengan penilaian memadai.
C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola
1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham BPR



tergolong memadai. - Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dimiliki BPR dinilai memadai. - Hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR saat ini dinilai memadai. - Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite berjalan dengan memadai. - Implementasi hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan di BPR menunjukkan kondisi memadai. - Implementasi hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan di BPR menunjukkan kondisi memadai. - Hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPR hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern dinilai cukup memadai. - Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern dengan pencapaian memadai. - Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud berjalan dengan memadai. - Implementasi hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit di BPR menunjukkan kondisi memadai. - Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi berjalan dengan memadai. - Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR BPR tergolong memadai.
Faktor Negatif
A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur
- Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris belum sesuai dengan ketentuan yaitu paling sedikit 3 (tiga) orang. Saat ini BPR memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan salah satunya menjabat sebagai Komisaris Utama. Sehingga masih terdapat kekosongan yaitu jabatan Komisaris Independen, saat ini sedang proses rekrutmen dan akan dilengkapi pada semester 1 tahun 2025 - Struktur organisasi telah disusun dengan memperhatikan penerapan tata kelola yang baik dan kompleksitas usaha BPR. Namun demikian belum dibentuknya komite audit dan komite remunerasi dan nominasi, yang akan dilengkapi saat proses konsolidasi
B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola
- Secara umum Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain. Namun terdapat beberapa temuan pemeriksaan OJK yang masih dalam proses tindak lanjut - BPR belum membentuk komite audit dan komite remunerasi dan nominasi, berdasarkan ketentuan POJK No 9 Tahun 2024 BAB XVIII Ketentuan Peralihan BPR diberikan jangka waktu untuk memenuhi ketentuan paling lambat tanggal 31 Desember 2025 - Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. Namun mitigasi risiko dalam proses perkreditan belum dilakukan secara optimal. - Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Telah terdapat kertas kerja yang digunakan untuk memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR dan telah dilaksanakan secara cukup efektif - Ketua SKAI sudah memiliki Sertifikat dari LPS PRATAMA di bidang Jasa Pengelola Keuangan Pada Unit Kompetensi Okupasi Auditor dan dinyatakan Kompeten. Namun Anggota SKAI yang lain belum memiliki Sertifikasi.
C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola



Adanya peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan tercapainya hampir semua komponen RBB, meskipun adanya peningkatan NPL menjadi 9,54%

Wonogiri, 29 Juli 2025

PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

Menyetujui



ANDRE WAHYU YUDHANTORO, S.E., M.M
Komisaris Utama



SARTI, S.E., M.M
Direktur Utama



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola
PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Semester I Tahun 2025**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- 2 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) selama semester I tahun 2025. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Wonogiri, 29 Juli 2025

PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)



ANDRE WAHYU YUDHANTORO, S.E., M.M
Komisaris Utama

Menyetujui



SARTI, S.E., M.M
Direktur Utama



KERTAS KERJA LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SEMESTER I TAHUN 2025

Faktor 1. Aspek Pemegang Saham

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah Terpenuhi	Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah Terpenuhi	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS telah tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Baik	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris dilaksanakan melalui rapat baik secara tatap muka maupun melalui zoom meeting minimal setiap bulan sekali.
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Baik	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris dilakukan secara aktif maupun pasif minimal satu kali sebulan.
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Baik	Penilaian terhadap indikator dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, dimana sampai dengan bulan laporan setoran modal dari pemegang saham sebesar 28,07%.
6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Sangat Baik	Pemegang saham telah memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, melalui penilaian Pihak Independen yang kompeten di bidangnya.



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Baik	Pengambilan keputusan melalui RUPS telah memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Baik	Pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil. Dalam pelaksanaan aksi korporasi, perlakuan yang adil di antaranya dalam hal pembagian Dividen yang dilaksanakan secara proporsional berdasarkan setoran modal
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Baik	Perkembangan kinerja BPR telah sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Sangat Baik	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris melalui penilaian dari Pihak Independen yang kompeten dibidangnya.
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Baik	Penggunaan laba dan pembagian dividen telah memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		7 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	



Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 1. Aspek Pemegang Saham
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/ atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Sebagian besar pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang- undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian besar terealisasi yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR. c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian besar pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS telah tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif dalam penerapan tata kelola.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Pelaksanaan komunikasi terkait visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris dinilai baik 2. Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris dilakukan minimal satu kali sebulan sehingga dinilai baik. 3. Penilaian terhadap indikator dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, yang dimiliki BPR adalah baik. 4. Pemegang saham telah memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dengan penilaian sangat baik. 5. Pengambilan keputusan melalui RUPS telah memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.
2)	Faktor Negatif



	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil. Dalam pelaksanaan aksi korporasi, perlakuan yang adil diantaranya dalam hal pembagian Dividen yang dilaksanakan secara proporsional berdasarkan setoran modal. 2. Perkembangan kinerja BPR telah sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya. 3. Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. 4. Penggunaan laba dan pembagian dividen telah memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Telah Terpenuhi	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan berjumlah 3 orang yaitu Direktur Utama, Direktur Pemasaran, dan Direktur Umum dan Kepatuhan. Direktur Umum dan Kepatuhan bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (YMFK).
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan 1.Sarti., S.E.,M.M sebagai Direktur Utama bertempat tinggal di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri. 2. Joko Santoso.,S.E sebagai Direktur Pemasaran bertempat tinggal di Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri. 3. Yani Harmini.,SP sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan bertempat tinggal di Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Seluruh anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank, dan/ atau lembaga lain (Partai Politik atau Organisasi Kemasyarakatan)
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Telah Terpenuhi	Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Telah Terpenuhi	Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yaitu Peraturan Direksi Nomor 03/ IV/ Per.Dir/2025 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang memuat tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan prosedur pengambilan keputusan Direksi.



7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Telah Terpenuhi	<i>Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR yaitu Peraturan Direksi Nomor 01/ I/ Per.Dir/2024 Tentang SOP Remunerasi</i>
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	<i>Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</i>



B. Proses Penerapan Tata Kelola			
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Baik	Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi,
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Baik	Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain.	Cukup Baik	Secara umum Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain. Namun terdapat beberapa temuan pemeriksaan OJK yang masih dalam proses tindak lanjut yaitu: a. pengisian jabatan komisaris independen dalam proses penjarangan. b. BPR akan segera memenuhi jabatan analis kredit pada setiap jaringan kantor. BPR akan memenuhi paling lambat sampai dengan Desember 2025. c. BPR akan melengkapi struktur komite pada saat konsolidasi.
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Baik	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Baik	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Baik	Setiap kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi telah memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.



16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Sangat Baik	Direksi tidak menggunakan Perusahaan untuk kepentingan pribadi. Segala remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi sesuai dengan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah. 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan. 3. Pemberian Remunerasi dan Fasilitas lainnya tersebut ditetapkan berdasarkan RUPS- LB tanggal 29 November 2024
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Baik	Direksi mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan baik yang diselenggarakan oleh OJK, Perbarindo, Perbamide maupun lembaga lain. Direksi juga menyelenggarakan pendidikan dan sosialisasi kebijakan secara mandiri yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Di samping itu Direksi juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Pengurus dan Pejabat Eksekutif setiap sebulan sekali, untuk membagikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, pada seluruh tingkatan atau jenjang, dan semua kegiatan tersebut didokumentasikan dengan baik.



19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Baik	Direksi mengungkapkan: a. tidak memiliki saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; b. tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR,
20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Baik	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Baik	Direksi telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, terakhir yaitu Peraturan Direksi Nomor 03/ IV/ Per.Dir/2025 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Baik	Direksi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, yaitu Peraturan Direksi Nomor 01/I/Per.Dir/2024 Tentang SOP Remunerasi. Secara berkala Direksi melakukan Perubahan struktur Gaji/ Penghasilan Pegawai dengan Surat Keputusan Direksi.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Sangat Baik	Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Cukup Baik	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala teknis misalnya penanganan kredit bermasalah yang belum sesuai dengan target.
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Baik	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Baik	Hasil rapat Direksi didokumentasikan dalam bentuk Notulen dan diarsipkan. Dissenting Opinion (perbedaan pendapat) sejauh ini belum ada, sedangkan jika ada perbedaan pendapat dalam rapat, selalu dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat.



27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Cukup Baik	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan tercapainya hampir semua komponen RBB, meskipun terdapat peningkatan NPL menjadi 9,54%
28	Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak- pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		9 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		14 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 2 (Memadai)	



Kesimpulan Penilaian Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik. c. Direksi telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lain namun terdapat temuan yang bersifat administratif dalam proses penyelesaian.	
No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi Jumlah Direksi 3 (tiga) orang yaitu Direktur Utama, Direktur Pemasaran, dan Direktur Umum dan Kepatuhan 2. Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan a. Sarti., S.E.,M.M sebagai Direktur Utama bertempat tinggal di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri. b. Joko Santoso.,S.E sebagai Direktur Pemasaran bertempat tinggal di Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri. c. Yani Harmini.,SP sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan bertempat tinggal di Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri. 3. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank, dan/atau lembaga lain (Partai Politik atau Organisasi Kemasyarakatan) 4. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris 5. Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi. 6. Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yaitu Peraturan Direksi Nomor 03/ IV/Per.Dir/2025 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang memuat tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan prosedur pengambilan keputusan Direksi. 7. Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR yaitu Peraturan Direksi Nomor 01/I/Per.Dir/2024 Tentang SOP Remunerasi 8. Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga



	ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 9. Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan, dengan penilaian telah terpenuhi. Dibuktikan dengan: a. Sarti, SE.MM, berdasarkan Salinan Keputusan OJK Nomor KEP-33/KO.0301/2021 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudari Sarti Selaku Calon Anggota Direksi (Direktur Utama) PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda). Selanjutnya diangkat sebagai Direktur Utama PT BPR BKK Wonogiri (Perseroda) berdasarkan RUPS-LB tanggal 27 April 2021 dan telah dilaporkan kepada OJK melalui surat Nomor KP-01/806/V/SU/2021 serta telah ditata usahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-806/ KO.0301/2021. Dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 27 April 2021 sampai dengan 27 April 2026. b. Yani Harmini, SP, berdasarkan Salinan Keputusan OJK Nomor KEP-3/KO.0301/2022 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudari Yani Harmini Selaku Calon Anggota Direksi (Direktur Umum dan Kepatuhan) PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda). Selanjutnya diangkat sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan PT BPR BKK Wonogiri (Perseroda) berdasarkan RUPS-LB tanggal 27 Januari 2022 dan telah dilaporkan kepada OJK melalui surat Nomor KP 01/147/I/SU/2022 serta telah ditata usahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-461/ KO.0301/2022. Dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan 27 Januari 2027. c. Joko Santoso, SE, berdasarkan Salinan Keputusan OJK Nomor KEP-26/KO.1301/2024 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudara Joko Santoso Selaku Calon Anggota Direksi (Direktur Pemasaran) PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda). Selanjutnya diangkat sebagai Direktur Pemasaran PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) berdasarkan RUPS-LB tanggal 31 Mei dan telah dilaporkan OJK melalui apolo serta telah ditata usahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-379/ KO.1301/2024. Dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 31 Mei 2024 s.d 31 Mei 2029.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi. 2. Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi 3. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris. 4. Pengambilan keputusan Direksi yang diambil telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja 5. Setiap kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi telah memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. 6. Direksi tidak menggunakan Perusahaan untuk kepentingan pribadi. Segala remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi sesuai dengan: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah. b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan. c. Pemberian Remunasi dan Fasilitas lainnya tersebut ditetapkan berdasarkan RUPS-LB tanggal 29 November 2024 7. Direksi mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan baik yang diselenggarakan oleh OJK, Perbarindo, Perbamida maupun lembaga lain. Direksi juga menyelenggarakan pendidikan dan



	sosialisasi kebijakan secara mandiri yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Di samping itu Direksi juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Pengurus dan Pejabat Eksekutif setiap sebulan sekali, untuk membagikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, pada seluruh tingkatan atau jenjang, dan semua kegiatan tersebut didokumentasikan dengan baik. 8. Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) melalui website internal yang mudah diakses oleh seluruh pegawai. Semua kewajiban dan hak pegawai dituangkan dalam : a. Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri berdasarkan surat nomor 524 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda). b. Peraturan Direksi Nomor 08/ IX/ Per.Dir/2022 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Disiplin Pegawai. c. Peraturan Direksi Nomor 09/ IX/ Per.Dir/2022 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Mutasi, Alih Status, Promosi Dan Demosi Pegawai. d. Peraturan Direksi Nomor 10/IX/Per.Dir/2022 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Cuti Pegawai. e. Peraturan Direksi Nomor 12/ Per.Dir/ IX/2022 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Perkawinan dan Perceraian Pegawai f. Peraturan Direksi Nomor 17/Per.Dir/IX/2022 Tentang Standar Operasional dan Prosedur WFH g. Peraturan Direksi No 18/Per.Dir/IX/2022 Tentang Pencabutan Peraturan Direksi Nomor 03/V/ Per.Dir/2020 tentang Pengelolaan SDM h. Peraturan Direksi Nomor 06/ VIII/ Per.Dir/2023 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Sistem Rekrutmen, Pengangkatan, Kepangkatan dan Pemberhentian Pegawai i. Peraturan Direksi No 01/Per.Dir/I/2024 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Remunerasi Pegawai j. Peraturan Direksi No 06/Per.Dir/III/2024 Tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan Tata Kerja Pegawai k. Peraturan Direksi No 07/ Per.Dir/ IV/2024 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia l. Peraturan Direksi No 08/Per.Dir/IV/2024 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Penilaian Kinerja Individu (Key Performance Indicators – KPI) m. Peraturan Direksi Nomor 10/ Per.Dir/ VI/2024 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Sistem Pengadaan Dan Pengangkatan Tenaga Kontrak Dan Alih Daya. 9. Implementasi indikator Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham BPR, di BPR menunjukkan kondisi baik. 10. Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 11. Direksi telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, terakhir yaitu Peraturan Direksi Nomor 03/IV/Per.Dir/2025 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi 12. Direksi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, yaitu Peraturan Direksi Nomor 01/I/ Per.Dir/2024 Tentang SOP Remunerasi. Secara berkala Direksi melakukan Perubahan struktur Gaji/ Penghasilan Pegawai dengan Surat Keputusan Direksi.
2)	Faktor Negatif
	Secara umum Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain. Namun terdapat beberapa temuan pemeriksaan OJK yang masih dalam proses tindak lanjut



C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. 2. Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. 3. Hasil rapat Direksi didokumentasikan dalam bentuk Notulen dan diarsipkan. Dissenting Opinion (perbedaan pendapat) sejauh ini belum ada, sedangkan jika ada perbedaan pendapat dalam rapat, selalu dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat. 4. Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak- pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
2)	Faktor Negatif
	1. Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR dengan penilaian cukup baik 2. Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan tercapainya hampir semua komponen RBB, meskipun adanya peningkatan NPL menjadi 9,54%



Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Belum Terpenuhi	Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris belum sesuai dengan ketentuan yaitu paling sedikit 3 (tiga) orang. Saat ini BPR hanya memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan salah satunya menjabat sebagai Komisaris Utama. Sehingga masih terdapat kekosongan yaitu jabatan Komisaris Independen dikarenakan mengundurkan diri. Saat ini sedang dalam proses rekrutmen.
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Sesuai dengan ketentuan, semua Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan: a. Andre Wahyu Yudhantoro, S.E.,M.M Sebagai Komisaris Utama bertempat tinggal di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. b. FX Pranata A.P.,M.Hum Sebagai Komisaris bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat, yang tertuang dalam Peraturan Dewan Komisaris Nomor 01/ VII/ Per.Kom- WNG /2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS lainnya. Dewan Komisaris tidak merangkap Jabatan sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR/ BPRS dan/atau Bank Umum.
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama Anggota Dewan Komisaris atau Direksi.
6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Belum Terpenuhi	Terdapat kekosongan Komisaris Independen dikarenakan mengundurkan diri dan saat ini sedang dalam proses rekrutmen.



7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Telah Terpenuhi	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan diangkat melalui RUPS-LB : 1. Andre Wahyu Yudhantoro, S.E.,M.M, berdasarkan Surat Kepala OJK Nomor S-220/ KO.0301/2023/2023 Tanggal 30 Maret 2023 hal Keputusan persetujuan atas pencalonan Dewan Komisaris (komisaris utama) PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) dan Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-17/ KO.0301/2023 Tanggal 29 Maret 2023Tentang kasil penilaian kemampuan dan kepatutan Sdr Andre Wahyu Yudhantoro, S.E,M.M selaku calon Komisaris Utama PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Kabupaten Wonogiri serta Pengangkatan sebagai Komisaris Utama berdasarkan RUPSLB Tanggal 5 April 2023 dengan masa jabatan tanggal 26 April 2023 sd 26 April 2027 dan telah dilaporkan ke OJK melalui APOLO. 2. Saudara FX Pranata A.P,M.Hum berdasarkan Surat Kepala OJK Nomor S-37/ KO.0301/2023 Tanggal 10 Januari 2023 hal Keputusan atas Pencalonan Anggota Dewan Komisaris PT BPR BKK Wonogiri (Perseroda) dan Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-02/ KO.0301/2023 tanggal 10 Januari 2023 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr FX Pranata selaku Calon Anggota Dewan Komisaris (Komisaris) PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) dan berdasarkan RUPSLB Nomor 63 tanggal 24 Januari 2023 dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 24 Januari 2023 sd 24 Januari 2027 dan telah dilaporkan ke OJK melalui APOLO.
8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	Kabijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris telah ditetapkan pada RUPS- LB tanggal 29 November 2024
B. Proses Penerapan Tata Kelola			



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Baik	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Baik	Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Sangat Baik	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Baik	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain. Hasil pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan pemeriksaan disampaikan oleh Direksi pada rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat pengurus.
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Baik	Dewan Komisaris secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Cukup Baik	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara cukup konsisten, terakhir dilakukan evaluasi pada tahun 2022.
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Baik	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.



16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Baik	Dewan Komisaris melaksanakan rapat rutin dengan Direksi secara berkala dalam upaya pemantauan kinerja Direksi dan dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan komisaris dimana pada semester 1 Tahun 2025 mengadakan rapat sebanyak 6 kali
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Sangat Baik	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Baik	Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan tugas Direksi dan telah memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Baik	Dewan Komisaris telah mengajukan kepada RUPS, terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah ditetapkan dengan RUPS- LB tanggal 29 November 2024
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Cukup Baik	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan cukup baik
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Baik	Dewan Komisaris secara berkala telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Baik	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Baik	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Sangat Baik	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.



25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	Dewan Komisaris dalam menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Cukup Baik	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan tercapainya hampir semua komponen RBB, meskipun adanya kenaikan NPL menjadi 9,54%.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		6 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		2 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Sebagian	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		12 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 4 (Kurang Memadai)	



Kesimpulan Penilaian Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	
Nilai Faktor	
Nilai 4 (Kurang Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Secara umum Dewan Komisaris telah memenuhi struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris dengan ruang lingkup sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan baik. c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. d. Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan remunerasi dan nominasi dengan ruang lingkup sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik. e. Hal yang menyebabkan penilaian menjadi kurang memadai karena tidak terpenuhinya struktur komisaris independen yang saat ini dalam proses pemenuhan.	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Sesuai dengan ketentuan, semua Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan: a. Andre Wahyu Yudhantoro, S.E.,M.M Sebagai Komisaris Utama bertempat tinggal di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. b. FX Pranata A.P.,M.Hum Sebagai Komisaris bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah 2. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat, yang tertuang dalam Peraturan Dewan Komisaris Nomor 01/ VII/ Per.Kom-WNG /2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. 3. Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS lainnya. Dewan Komisaris tidak merangkap Jabatan sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR/BPRS dan/atau Bank Umum. 4. Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama Anggota Dewan Komisaris atau Direksi. 5. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan diangkat melalui RUPS-LB : a. Andre Wahyu Yudhantoro, S.E.,M.M, berdasarkan Surat Kepala OJK Nomor S-220/ KO.0301/2023/2023 Tanggal 30 Maret 2023 hal Keputusan persetujuan atas pencalonan Dewan Komisaris (komisaris utama) PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) dan Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-17/ KO.0301/2023 Tanggal 29 Maret 2023Tentang kasil penilaian kemampuan dan kepatutan Sdr Andre Wahyu Yudhantoro, S.E,M.M selaku calon Komisaris Utama PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Kabupaten Wonogiri serta RUPSLB Tanggal 5 April 2023 dengan masa jabatan tanggal 26 April 2023 sd 26 April 2027 dan telah dilaporkan ke OJK melalui APOLO b. Saudara FX Pranata A.P.,M.Hum berdasarkan Surat Kepala OJK Nomor S-37/ KO.0301/2023 Tanggal 10 Januari 2023 hal Keputusan atas Pencalonan Anggota Dewan Komisaris PT BPR BKK Wonogiri (Perseroda) dan Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-02/ KO.0301/2023 tanggal 10 Januari 2023 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr FX Pranata selaku Calon Anggota Dewan Komisaris (Komisaris) PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) dan berdasarkan RUPSLB Nomor 63 tanggal 24 Januari 2023 dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 24 Januari 2023 sd 24 Januari 2027 dan telah dilaporkan ke OJK melalui



	APOLO 6. Kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris telah ditetapkan pada RUPS-LB tanggal 29 November 2024
2)	Faktor Negatif
	Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris belum sesuai dengan ketentuan yaitu paling sedikit 3 (tiga) orang. Saat ini BPR hanya memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan salah satunya menjabat sebagai Komisaris Utama. Sehingga masih terdapat kekosongan yaitu jabatan Komisaris Independen dikarenakan mengundurkan diri. Saat ini sedang dalam proses rekrutmen.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati- hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS. 2. Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan 3. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. 4. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang- undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain. Hasil pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan pemeriksaan disampaikan oleh Direksi pada rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat pengurus. 5. Dewan Komisaris secara berkala dan sewaktu- waktu apabila diperlukan meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR. 6. Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara cukup konsisten, terakhir dilakukan evaluasi pada tahun 2022. 7. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. 8. Dewan Komisaris melaksanakan rapat rutin dengan Direksi secara berkala dalam upaya pemantauan kinerja Direksi dan dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan komisaris dimana pada semester 1 Tahun 2025 mengadakan rapat sebanyak 6 kali 9. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 10. Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan tugas Direksi dan telah memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris. 11. Dewan Komisaris telah mengajukan kepada RUPS, terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang ditelaah ditetapkan dengan RUPS-LB tanggal 29 November 2024 12. Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan cukup baik 13. Dewan Komisaris secara berkala telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	



1)	Faktor Positif
	1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. 2. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. 3. Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran. 4. Dewan Komisaris dalam menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. 5. Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan tercapainya hampir semua komponen RBB, meskipun adanya kenaikan NPL menjadi 9,54%.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sebagian Terpenuhi	BPR telah memiliki komite Direksi yaitu Komite Kredit, Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan Satuan Kerja audit Intern. Sedangkan komite Dewan Komisaris sebagian telah terpenuhi yaitu Komite Pemantau Risiko. Pemenuhan Komite Dewan Komisaris akan dilaksanakan setelah proses konsolidasi.
2	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing- masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing- masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu Peraturan Direksi Nomor 05/ V/ Per.Dir/2025 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Baik	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit,
4	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	Tidak Baik	BPR belum membentuk komite audit, berdasarkan ketentuan POJK No 9 Tahun 2024 BAB XVIII Ketentuan Peralihan BPR diberikan jangka waktu untuk memenuhi ketentuan paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
5	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	Baik	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko
6	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Tidak Baik	BPR belum membentuk komite remunerasi dan nominasi, berdasarkan ketentuan POJK No 9 Tahun 2024 BAB XVIII Ketentuan Peralihan BPR diberikan jangka waktu untuk memenuhi ketentuan paling lambat tanggal 31 Desember 2025



7	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Cukup Baik	Anggota Komite Kredit menjalankan tugasnya secara efektif termasuk menyelenggarakan rapat komite yang dilakukan bersama direksi sebagai pemutus kredit.
8	Masing- masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	Baik	Masing- masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

9	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	Baik	Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan Komite Kredit memberikan rekomendasi kepada direksi terhadap pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.
10	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	Cukup Baik	Komite pemantau risiko telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait fungsi manajemen risiko dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris. Tetapi BPR belum membentuk komite dewan komisaris yang lain.
11	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Baik	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Sebagian

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	5 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	2 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik



Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 4 (Kurang Memadai)
Kesimpulan Penilaian Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite		
Nilai Faktor		
Nilai 4 (Kurang Memadai)		
Penjelasan Nilai Faktor		
Saat ini BPR belum sepenuhnya terpenuhi struktur komite namun infrastruktur telah terpenuhi sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Masing-masing komite memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. b. Masing-masing komite telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite dengan ruang lingkup sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. c. Faktor penilaian kurang memadai disebabkan karena tidak terpenuhinya seluruh komite Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan OJK. Pengisian komite Dewan Komisaris akan dilengkapi setelah Konsolidasi BPR BKK se Jawa Tengah.		
No	Analisa Faktor Positif dan Negatif	
A. Struktur dan Infrastruktur		
1)	Faktor Positif	
	1. BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu Peraturan Direksi Nomor 05/V/Per.Dir/2025 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite.	
2)	Faktor Negatif	
	1. BPR telah memiliki komite Direksi yaitu Komite Kredit, Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan Satuan Kerja audit Intern. Sedangkan komite Dewan Komisaris sebagian telah terpenuhi yaitu Komite Pemantau Risiko. Pemenuhan Komite Dewan Komisaris akan dilaksanakan setelah proses konsolidasi.	
B. Proses Penerapan Tata Kelola		
1)	Faktor Positif	
	1. Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit, 2. Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko 3. Anggota Komite Kredit menjalankan tugasnya secara efektif termasuk menyelenggarakan rapat komite yang dilakukan bersama direksi sebagai pemutus kredit. 4. Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	
2)	Faktor Negatif	
	1. BPR belum membentuk komite audit, berdasarkan ketentuan POJK No 9 Tahun 2024 BAB XVIII Ketentuan Peralihan BPR diberikan jangka waktu untuk memenuhi ketentuan paling lambat tanggal 31 Desember 2025. 2. BPR belum membentuk komite remunerasi dan nominasi, berdasarkan ketentuan POJK No 9 Tahun 2024 BAB XVIII Ketentuan Peralihan BPR diberikan jangka waktu untuk memenuhi ketentuan paling lambat tanggal 31 Desember 2025	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola		
1)	Faktor Positif	



	1. Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan Komite Kredit memberikan rekomendasi kepada direksi terhadap pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi. 2. Komite pemantau risiko telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait fungsi manajemen risiko dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris. Tetapi BPR belum membentuk komite dewan komisaris yang lain. 3. Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Telah Terpenuhi	BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomo 39/ V/ Per.Dir/2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Baik	Belum pernah terjadi benturan kepentingan dalam operasional Perusahaan, namun dalam hal terjadi benturan kepentingan, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pegawai tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Baik	Belum pernah terjadi benturan kepentingan dalam operasional BPR, namun dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Baik	Di semester 1 tahun 2025 tidak ada benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Perusahaan.
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Baik	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		4 Indikator	



Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR telah memiliki dan menginisikan kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup memadai, serta berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik sesuai dengan kebijakan. b. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan ditangani dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan sangat baik. c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara baik.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 39/V/Per.Dir/2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Belum pernah terjadi benturan kepentingan dalam operasional Perusahaan, namun dalam hal terjadi benturan kepentingan, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pegawai tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Belum pernah terjadi benturan kepentingan dalam operasional BPR, namun dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.



	2. Di semester 1 tahun 2025 tidak ada benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Perusahaan. 3. BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR sudah memiliki Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama, tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana dan mampu bekerja secara independen.
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah dibentuk sejak bulan Agustus 2019 yang bekerja secara independen terhadap operasional Perusahaan.
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Telah Terpenuhi	Satuan Kerja Kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan berupa Peraturan Direksi Nomor 43/ VI/ Per.Dir/2020 Tentang Pedoman Penerapan Fungsi Kepatuhan.
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Telah Terpenuhi	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. Ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, termuat dalam Peraturan Direksi No 06/Per.Dir/III/2024 Tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan Tata Kerja Pegawai
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Cukup Baik	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. Namun mitigasi risiko dalam proses perkreditan belum dilakukan secara optimal yang tercermin peningkatan NPL dari periode sebelumnya.



6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Baik	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Telah terdapat kertas kerja yang digunakan untuk memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR dan telah dilaksanakan secara efektif.
7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Baik	Ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, termuat dalam Peraturan Direksi No 06/ Per.Dir/ III/2024 Tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan Tata Kerja Pegawai

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	Baik	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan dari tahun sebelumnya.
9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik



Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 2 (Memadai)
Kesimpulan Penilaian Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan		
Nilai Faktor		
Nilai 2 (Memadai)		
Penjelasan Nilai Faktor		
Secara umum penerapan fungsi kepatuhan telah memenuhi struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris dan berhasil menurunkan tingkat pelanggaran. b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki dan/ atau menginikikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.		
No	Analisa Faktor Positif dan Negatif	
A. Struktur dan Infrastruktur		
1)	Faktor Positif	
	1. BPR sudah memiliki Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama, tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana dan mampu bekerja secara independen. 2. Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah dibentuk sejak bulan Agustus 2019 yang bekerja secara independen terhadap operasional Perusahaan. 3. Satuan Kerja Kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan berupa Peraturan Direksi Nomor 43/ VI/Per.Dir/2020 Tentang Pedoman Penerapan Fungsi Kepatuhan. 4. BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. Ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, termuat dalam Peraturan Direksi No 06/Per.Dir/III/2024 Tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan Tata Kerja Pegawai	
2)	Faktor Negatif	
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.	
B. Proses Penerapan Tata Kelola		
1)	Faktor Positif	
	1. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Telah terdapat kertas kerja yang digunakan untuk memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR dan telah dilaksanakan secara efektif. 2. Ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, termuat dalam Peraturan Direksi No 06/Per.Dir/III/2024 Tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan Tata Kerja Pegawai	
2)	Faktor Negatif	



	1. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. Namun mitigasi risiko dalam proses perkreditan belum dilakukan secara optimal yang tercermin peningkatan NPL dari periode sebelumnya.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan dari tahun sebelumnya. 2. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggungjawab terhadap fungsi Audit Intern,
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi Auditor Intern sesuai peraturan perundang- undangan dan telah disetujui Direktur Utama dan Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 15/ II/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern.
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Telah Terpenuhi	Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, independen terhadap satuan kerja operasional. Hal ini tercermin dari Struktur Organisasi dimana SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan tidak merangkap jabatan dengan Satuan Kerja Operasional lainnya, serta tidak ada perintah kerja dari Direksi untuk melaksanakan fungsi operasional.
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Telah Terpenuhi	Sebagaimana dalam Struktur Organisasi yang sudah ditetapkan, SKAI yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Telah Terpenuhi	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Baik	Perusahaan sudah menerapkan, aspek dan unsur kegiatan audit intern sebagaimana ketentuan antara lain: a. Perencanaan audit tahunan b. Penunjukan tenaga audit c. Rencana audit d. Strategi audit e. Pelaksanaan audit f. Konfirmasi hasil audit g. Pembahasan hasil audit h. Monitoring dll.



7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	Sangat Baik	Telah dilaksanakan kaji ulang dari pihak ekstern atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern periode tahun 2022 dan telah dilaporkan kepada OJK dengan penilaian secara umum telah memenuhi fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab SKAI. Dan rencananya akan dilakukan kaji ulang kembali dari pihak ekstern pada semester 2 tahun 2025.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Baik	Pelaksanaan audit intern sudah melalui tahap-tahap yang mencakup : a. Persiapan Audit. b. Penyusunan Program Audit. c. Pelaksanaan Audit. d. Pelaporan Hasil Audit. Tindak lanjut pasca audit telah dipantau sesuai komitmen auditee
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	Cukup Baik	Ketua SKAI sudah memiliki Sertifikat dari LPS PRATAMA di bidang Jasa Pengelola Keuangan Pada Unit Kompetensi Okupasi Auditor dan dinyatakan Kompeten. Namun Anggota SKAI yang lain belum memiliki Sertifikasi.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup Baik	Satuan kerja audit intern telah menyusun audit program sebelum melakukan pemeriksaan ke unit atau satuan kerja yang akan dijadikan obyek audit (auditee).
11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu.	Baik	Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, selalu menyampaikan Laporan Pelaksanaan Audit Intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, serta menyampaikan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	5 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	2 Indikator



Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggungjawab terhadap fungsi Audit Intern, 2. Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi Auditor Intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui Direktur Utama dan Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 15/ II/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern. 3. Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, independen terhadap satuan kerja operasional. Hal ini tercermin dari Struktur Organisasi dimana SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan tidak merangkap jabatan dengan Satuan Kerja Operasional lainnya, serta tidak ada perintah kerja dari Direksi untuk melaksanakan fungsi operasional. 4. Sebagaimana dalam Struktur Organisasi yang sudah ditetapkan, SKAI yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. 5. BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Perusahaan sudah menerapkan, aspek dan unsur kegiatan audit intern sebagaimana ketentuan antara lain: a. Perencanaan audit tahunan



	b. Penunjukan tenaga audit c. Rencana audit d. Strategi audit e. Pelaksanaan audit f. Konfirmasi hasil audit g. Pembahasan hasil audit h. Monitoring dll. 2. Telah dilaksanakan kaji ulang dari pihak ekstern atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern periode tahun 2022 dan telah dilaporkan kepada OJK dengan penilaian secara umum telah memenuhi fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab SKAI. Dan rencananya akan dilakukan kaji ulang kembali dari pihak ekstern pada semester 2 tahun 2025. 3. Pelaksanaan audit intern sudah melalui tahap-tahap yang mencakup : a. Persiapan Audit. b. Penyusunan Program Audit. c. Pelaksanaan Audit. d. Pelaporan Hasil Audit. Tindak lanjut pasca audit telah dipantau sesuai komitmen auditee
2)	Faktor Negatif
	1. Ketua SKAI sudah memiliki Sertifikat dari LPS PRATAMA di bidang Jasa Pengelola Keuangan Pada Unit Kompetensi Okupasi Auditor dan dinyatakan Kompeten. Namun Anggota SKAI yang lain belum memiliki Sertifikasi.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, selalu menyampaikan Laporan Pelaksanaan Audit Intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, serta menyampaikan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2)	Faktor Negatif
	Satuan Kerja Audit Intern telah menyusun audit program sebelum melakukan pemeriksaan ke unit atau satuan kerja yang akan dijadikan obyek audit (auditee).



Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Telah Terpenuhi	Penugasan Audit kepada kantor KAP Ruchendi, Marjito, Rushadi dan Rekan untuk melakukan Audit atas laporan keuangan Perusahaan tahun 2024, tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Audit Atas Laporan Keuangan PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Nomor 024.231/ KAP.RMR/ SP/ X/2024 Dan KP-01/61/ PKS/ X/2024 dengan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan SE OJK No.36 /SEOJK.03/2017. Dalam melaksanakan pekerjaannya KAP menggunakan Standar Profesional Akuntan Publik, serta apabila pemeriksaan telah selesai akan menyampaikan laporan hasil audit dan Management Letter kepada Perusahaan serta OJK.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Sangat Baik	KAP Ruchendi, Marjito, Rushadi dan Rekan berdasar persetujuan RUPS tanggal 11 Oktober 2024 ditunjuk untuk melakukan audit laporan keuangan tahun 2024. KAP Ruchendi, Marjito, Rushadi dan Rekan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan : 1. Akuntan Publik dengan Nomor Register AP No. 0182. 2. Nomor Surat Tanda Terdaftar Akuntan Publik: STTD.AP00004/ PB.122/2017. 3. Nomor Surat Tanda Terdaftar Kantor Akuntan Publik: STTD.KAP00020/PM.22/2017.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Baik	Audit KAP posisi laporan tahun 2024 telah dilakukan oleh KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi dan Rekan dan telah dilaporkan OJK dengan Nomor Surat KP-01/401/ III/ SU/2025 pada tanggal 17 Maret 2025.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Baik	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sangat Baik	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			



Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil audit dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, Hasil audit menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR.	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Penugasan Audit kepada kantor KAP Ruchendi, Marjito, Rushadi dan Rekan untuk melakukan Audit atas laporan keuangan Perusahaan tahun 2024, tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Audit Atas Laporan Keuangan PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Nomor 024.231/KAP.RMR/SP/X/2024 Dan KP-01/61/PKS/X/2024 dengan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan SE OJK No.36 /SEOJK.03/2017. 2. Dalam melaksanakan pekerjaannya KAP menggunakan Standar Profesional Akuntan Publik, serta apabila pemeriksaan telah selesai akan menyampaikan laporan hasil audit dan Management Letter kepada Perusahaan serta OJK.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif



	1. KAP Ruchendi, Marjito, Rushadi dan Rekan berdasar persetujuan RUPS tanggal 11 Oktober 2024 ditunjuk untuk melakukan audit laporan keuangan tahun 2024. KAP Ruchendi, Marjito, Rushadi dan Rekan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan : a. Akuntan Publik dengan Nomor Register AP No. 0182. b. Nomor Surat Tanda Terdaftar Akuntan Publik: STTD.AP00004/PB.122/2017. c. Nomor Surat Tanda Terdaftar Kantor Akuntan Publik: STTD.KAP00020/PM.22/2017. 2. Audit KAP posisi laporan tahun 2024 telah dilakukan oleh KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi dan Rekan dan telah dilaporkan OJK dengan Nomor Surat KP-01/401/III/SU/2025 pada tanggal 17 Maret 2025.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas. 2. Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko sudah dibentuk sejak bulan Agustus 2019 yang bekerja Independen terhadap operasional BPR yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2	BPR memiliki dan mengingkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	Telah Terpenuhi	Perusahaan telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 63/ VIII/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko. Untuk Penetapan Limit Risiko tertuang dalam Surat Edaran Direksi Nomor KP-01/09/ VII/ SE/2024 Tentang Tingkat Risiko (Risk Appetite) dan Toleransi Risiko (Risk Tolerance).
3	BPR memiliki dan mengingkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Telah Terpenuhi	Perusahaan telah memiliki kebijakan dan Prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 63/ VIII/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

5	Direksi:a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Baik	<i>Direksi telah menyusun kebijakan dan Pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 63/ VIII/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</i>
6	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Baik	<i>Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yaitu Peraturan Direksi Nomor 63/ VIII/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</i>
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	Baik	<i>BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko di antaranya proses persetujuan kredit mempertimbangkan pendapat Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko (SKKMR), mempelajari dan mengevaluasi Laporan Profil Risiko dari SKKMR serta dalam hal penerbitan produk baru mempertimbangkan faktor- faktor risiko yang mempengaruhi produk baru tersebut.</i>
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	Baik	<i>BPR telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.</i>



9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>BPR telah menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APU, PPT, dan PPPSPM) dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain saat melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah selalu dilakukan CDD</i>
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>BPR telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</i>
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	Baik	<i>BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh dengan cara melakukan pemantauan terhadap kemungkinan risiko yang akan terjadi diantaranya dengan melakukan perbaikan/ pengkinian SOP, sosialisasi penerapan manajemen risiko kepada seluruh pegawai dan penilaian profil risiko terhadap masing- masing jenis risiko secara berkala.</i>
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>BPR telah berupaya menerapkan Manajemen Risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana laporan profil risiko yang telah disampaikan ke OJK. Perusahaan cukup mampu melakukan pengendalian Risiko dengan kondisi sebagai berikut: 1. Risiko kredit, terjadi peningkatan NPL dan KKR dari semester sebelumnya. 2. Risiko likuiditas, selalu memantau rasio LDR, 3. Risiko operasional, masih terdapat kelemahan terutama proses pengikatan agunan. 4. Risiko kepatuhan, masih adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku antara lain kekurangan pembayaran pajak dan denda keterlambatan pembayaran pajak. 5. Risiko reputasi, terkelola dengan baik, dalam semester 1 tahun 2025 tidak terdapat pemberitaan negatif mengenai BPR dan tidak ditemukan adanya pengaduan nasabah 6. Risiko strategik, pencapaian RBB semester 1 tahun 2025 hampir semua komponen telah tercapai</i>



13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Baik	Perusahaan telah mempunyai sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh dengan mempergunakan jasa vendor PT USSI PINBUK PRIMA SOFTWARE sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor KP-01/20/ IV/ PKS/2025 dan Nomor 022/PKS/USSI/IV/2025.
14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Baik	Direksi telah melakukan upaya pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi di antaranya melalui pembinaan, sosialisasi, dan pelatihan- pelatihan berkaitan dengan manajemen risiko termasuk mengirim Pejabat Struktural untuk mengikuti pendidikan bersertifikasi Manajemen Risiko secara bertahap.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	Baik	BPR telah menyusun dan melaporkan Laporan Profil Risiko Setiap Semester kepada OJK, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	Baik	BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	14 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator



Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga: 1) peringkat risiko rendah; 2) tidak terdapat fraud; dan/ atau 3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah. b. BPR telah memiliki dan menginikan pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut c. Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian besar jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko sudah dibentuk sejak bulan Agustus 2019 yang bekerja Independen terhadap operasional BPR yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2. Perusahaan telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 63/VIII/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko. Untuk Penetapan Limit Risiko tertuang dalam Surat Edaran Direksi Nomor KP-01/09/ VII/ SE/2024 Tentang Tingkat Risiko (Risk Appetite) dan Toleransi Risiko (Risk Tolerance). 3. Perusahaan telah memiliki kebijakan dan Prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 63/ VIII/Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas



	Jasa Keuangan. 2. Direksi telah menyusun kebijakan dan Pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 63/VIII/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. 3. Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yaitu Peraturan Direksi Nomor 63/VIII/Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. 4. BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko di antaranya proses persetujuan kredit mempertimbangkan pendapat Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko (SKKMR), mempelajari dan mengevaluasi Laporan Profil Risiko dari SKKMR serta dalam hal penerbitan produk baru mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang mempengaruhi produk baru tersebut. 5. BPR telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan. 6. BPR telah menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APU, PPT, dan PPPSPM) dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain saat melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah selalu dilakukan CDD 7. BPR telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 8. BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh dengan cara melakukan pemantauan terhadap kemungkinan risiko yang akan terjadi diantaranya dengan melakukan perbaikan/ pengkinian SOP, sosialisasi penerapan manajemen risiko kepada seluruh pegawai dan penilaian profil risiko terhadap masing-masing jenis risiko secara berkala. 9. BPR telah berupaya menerapkan Manajemen Risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana laporan profil risiko yang telah disampaikan ke OJK. Perusahaan cukup mampu melakukan pengendalian Risiko dengan kondisi sebagai berikut: a. Risiko kredit, terjadi peningkatan NPL dan KKR dari semester sebelumnya. b. Risiko likuiditas, selalu memantau rasio LDR, c. Risiko operasional, masih terdapat kelemahan terutama proses pengikatan agunan. d. Risiko kepatuhan, masih adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku antara lain kelemahan proses restrukturisasi, penyelesaian kredit bermasalah, dan kesalahan laporan bulanan e. Risiko reputasi, terkelola dengan baik, dalam semester 1 tahun 2025 tidak terdapat pemberitaan negatif mengenai BPR dan tidak ditemukan adanya pengaduan nasabah f. Risiko strategik, pencapaian RBB semester 1 tahun 2025 hampir semua komponen telah tercapai 10. Perusahaan telah mempunyai sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh dengan mempergunakan jasa vendor PT USSI PINBUK PRIMA SOFTWARE sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor KP-01/20/IV/ PKS/2025 dan Nomor 022/PKS/USSI/IV/2025. 11. Direksi telah melakukan upaya pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi di antaranya melalui pembinaan, sosialisasi, dan pelatihan- pelatihan berkaitan dengan manajemen risiko termasuk mengirim Pejabat Struktural untuk mengikuti pendidikan bersertifikasi Manajemen Risiko secara bertahap.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

	1. BPR telah menyusun dan melaporkan Laporan Profil Risiko Setiap Semester kepada OJK, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik. 2. BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 3. BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Telah Terpenuhi	Perusahaan memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK yang dituangkan dalam Peraturan Direksi Nomor KP-01/09/ Per.Dir/XI/2023.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan.	Baik	Kebijakan, sistem, dan prosedur BMPK disusun dengan berpedoman pada POJK Nomor 23 Tahun 2022 yaitu Peraturan Direksi Nomor KP-01/09/ Per.Dir/ XI/2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit tanggal 27 November 2023.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Sangat Baik	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan kredit besar mengacu pada POJK tentang BMPK dan Peraturan Internal Perusahaan yaitu, Peraturan Direksi Nomor 17/ XI/ Per.Dir/2024 Tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sangat Baik	BPR tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		2 Indikator	



Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR. b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang- undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/ atau pelampauan BMPK dilakukan dengan segera. c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Perusahaan memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK yang dituangkan dalam Peraturan Direksi Nomor KP-01/09/Per.Dir/XI/2023.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Kebijakan, sistem, dan prosedur BMPK disusun dengan berpedoman pada POJK Nomor 23 Tahun 2022 yaitu Peraturan Direksi Nomor KP-01/09/ Per.Dir/ XI/2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit tanggal 27 November 2023. 2. Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan kredit besar mengacu pada POJK tentang BMPK dan Peraturan Internal Perusahaan yaitu, Peraturan Direksi Nomor 17/ XI/ Per.Dir/2024 Tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif



	1. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2. BPR tidak pernah melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Telah Terpenuhi	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	BPR telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Telah Terpenuhi	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan yaitu Peraturan Direksi Nomor 01/I/Per.Dir/2025 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank dan kebijakan dan prosedur terkait sistem teknologi informasi yaitu Peraturan Direksi Nomor 16/X/Per.Dir.2024
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Baik	BPR telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Baik	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Baik	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Baik	Pada semester 1 tahun 2025 tidak terdapat kasus pengaduan nasabah yang ditujukan untuk BPR, pengurus maupun pegawai.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		9 Indikator	



Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. BPR memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum. c. BPR telah memiliki dan menginikn kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur. d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tidal terdapat laporan pengaduan dari nasabah dan apabila ada pengaduan dapat ditindaklanjuti dengan segera.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. 2. BPR telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris. 3. BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan yaitu Peraturan Direksi Nomor 1/ I/ Per.Dir/2025 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank dan kebijakan dan prosedur terkait sistem teknologi informasi yaitu Peraturan Direksi Nomor 16/X/Per.Dir.2024
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi. 2. BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit



	memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 3. BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 4. BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 5. BPR telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 6. Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat. 2. Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 3. Pada tahun 2024 tidak terdapat kasus pengaduan nasabah yang ditujukan untuk BPR, pengurus maupun pegawai. 4. Telah dilakukan perbaikan terkait kelemahan penerapan teknologi informasi dalam rangka mendukung kegiatan operasional, tercermin dari telah dilakukan perbaikan core banking system diantaranya telah mengakomodir pelaksanaan APU, PPT dan PPPSPM.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 12. Rencana Bisnis BPR

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Telah Terpenuhi	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Telah Terpenuhi	Rencana bisnis BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Baik	Secara garis besar RBB disusun berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan. b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian. c. Penerapan Manajemen Risiko. Faktor-faktor tersebut diungkap dalam Ringkasan Eksekutif dan Strategi Bisnis dan Kebijakan Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan RBB, dilakukan setiap dilaksanakan rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat. Pengawasan secara pasif dilakukan dengan memantau perkembangan melalui laporan yang bisa diakses melalui sarana Teknologi Informasi.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Baik	Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan RBB dilakukan setiap dilaksanakan rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat. Pengawasan secara pasif dilakukan dengan memantau perkembangan melalui laporan yang bisa diakses melalui sarana Teknologi Informasi.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			



6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</i>
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Baik	<i>Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis telah tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.</i>

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 12. Rencana Bisnis BPR	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian besar komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	



1)	Faktor Positif
	1. Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. 2. Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 3. Rencana bisnis BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Secara garis besar RBB disusun berdasarkan realisasi tahun tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan. b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip ke hati-hatian. c. Penerapan Manajemen Risiko. Faktor- faktor tersebut diungkap dalam Ringkasan Eksekutif dan Strategi Bisnis dan Kebijakan Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan RBB, dilakukan setiap dilaksanakan rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat. Pengawasan secara pasif dilakukan dengan memantau perkembangan melalui laporan yang bisa diakses melalui sarana Teknologi Informasi. 2. Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan RBB dilakukan setiap dilaksanakan rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat. Pengawasan secara pasif dilakukan dengan memantau perkembangan melalui laporan yang bisa diakses melalui sarana Teknologi Informasi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2. Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis telah tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.



Kesimpulan Akhir

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 2 (Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 2 (Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 4 (Kurang Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Nilai 4 (Kurang Memadai)
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 2 (Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 2 (Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 2 (Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 2 (Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 2 (Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 2 (Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 2 (Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 2 (Memadai)
Modus Nilai Faktor		Nilai 2
Median Nilai Faktor		Nilai 2
Rata-rata Nilai Faktor		Nilai 2.33
Peringkat Komposit		2
Predikat Komposit		Baik

Kesimpulan
Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.
Faktor Positif
A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur
1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham dengan pencapaian terpenuhi secara keseluruhan. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan. 3. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan dengan pencapaian terpenuhi secara keseluruhan. 4. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan. 5. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPR berada dalam kondisi terpenuhi secara keseluruhan. 6. Implementasi struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern di BPR menunjukkan kondisi terpenuhi secara keseluruhan. 7. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan. 8. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan. 9. BPR telah mengimplementasikan struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem



- Teknologi Informasi dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan.
10. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan.

B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola

1. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham dengan penilaian memadai.
2. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR berada dalam kondisi memadai.
3. Proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR saat ini dinilai memadai.
4. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite berjalan dengan cukup memadai.
5. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan yang dinilai memadai.
6. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan yang dinilai cukup memadai.
7. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern yang dimiliki BPR dinilai memadai.
8. Penilaian terhadap proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dimiliki BPR adalah memadai.
9. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dimiliki BPR dinilai memadai.
10. Proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit dinilai memadai.
11. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dengan pencapaian memadai.
12. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR dengan penilaian memadai.

C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham BPR tergolong memadai.
2. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dimiliki BPR dinilai memadai.
3. Hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR saat ini dinilai memadai.
4. Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite berjalan dengan memadai.
5. Implementasi hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan di BPR menunjukkan kondisi memadai.
6. Implementasi hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan di BPR menunjukkan kondisi memadai.
7. Hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPR hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern dinilai cukup memadai.
8. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern dengan pencapaian memadai.
9. Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud berjalan dengan memadai.
10. Implementasi hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit di BPR menunjukkan kondisi memadai.
11. Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi berjalan dengan memadai.
12. Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR BPR tergolong memadai.

Faktor Negatif

A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur

1. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris belum sesuai dengan ketentuan yaitu paling sedikit 3 (tiga) orang. Saat ini BPR memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan salah satunya menjabat sebagai Komisaris Utama. Sehingga masih terdapat kekosongan yaitu jabatan



Komisaris Independen, saat ini sedang proses rekrutmen dan akan dilengkapi pada semester 1 tahun 2025

2. Struktur organisasi telah disusun dengan memperhatikan penerapan tata kelola yang baik dan kompleksitas usaha BPR. Namun demikian belum dibentuknya komite audit dan komite remunerasi dan nominasi, yang akan dilengkapi saat proses konsolidasi

B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Secara umum Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain. Namun terdapat beberapa temuan pemeriksaan OJK yang masih dalam proses tindak lanjut
2. BPR belum membentuk komite audit dan komite remunerasi dan nominasi, berdasarkan ketentuan POJK No 9 Tahun 2024 BAB XVIII Ketentuan Peralihan BPR diberikan jangka waktu untuk memenuhi ketentuan paling lambat tanggal 31 Desember 2025
3. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. Namun mitigasi risiko dalam proses perkreditan belum dilakukan secara optimal.
4. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Telah terdapat kertas kerja yang digunakan untuk memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR dan telah dilaksanakan secara cukup efektif
5. Ketua SKAI sudah memiliki Sertifikat dari LPS PRATAMA di bidang Jasa Pengelola Keuangan Pada Unit Kompetensi Okupasi Auditor dan dinyatakan Kompeten. Namun Anggota SKAI yang lain belum memiliki Sertifikasi.

C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola

Adanya peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan tercapainya hampir semua komponen RBB, meskipun adanya peningkatan NPL menjadi 9,54%



KESIMPULAN UMUM
HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
SEMESTER II TAHUN 2025

Nama BPR : PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
Alamat : JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah
Nomor Telepon : 0273 322214 - 0273 322747
Posisi Laporan : Semester II Tahun 2025
Modal Inti : Rp85.585.926.819
Total Aset : Rp775.021.247.653

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 2 (Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 2 (Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 4 (Kurang Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Nilai 4 (Kurang Memadai)
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 2 (Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 2 (Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 2 (Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 2 (Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 2 (Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 2 (Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 2 (Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 2 (Memadai)
Peringkat Komposit		2
Predikat Komposit		Baik



Kesimpulan
Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola antara lain belum terpenuhinya Komisaris Independen karena saat ini BPR sedang dalam proses Konsolidasi, namun secara umum kelemahan tersebut tidak mengurangi kualitas kerja Dewan Komisaris sehingga tidak berdampak signifikan yang mempengaruhi penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
Faktor Positif
1. Aspek pemegang saham, pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil, perkembangan kinerja BPR telah sejalan dengan rencana strategis, dan tidak melakukan benturan kepentingan 2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemegang saham melalui RUPS. 3. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian. 4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, Komite pemantau risiko telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait fungsi manajemen risiko dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris. 5. Penanganan benturan kepentingan, belum pernah terjadi benturan kepentingan dalam operasional Perusahaan. 6. Penerapan fungsi kepatuhan, Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR. 7. Penerapan fungsi audit internal, SKAI selalu menyampaikan Laporan Pelaksanaan Audit Intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. 8. Penerapan fungsi audit ekstern, hasil audit telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas. 9. Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud, BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. 10. Batas maksimum pemberian kredit, laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan ke OJK. 11. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum. 12. Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan.
Faktor Negatif
1. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris belum sesuai dengan ketentuan yaitu paling sedikit 3 (tiga) orang. Saat ini masih terdapat kekosongan jabatan Komisaris Independen, saat ini sedang proses konsolidasi dan menunggu arahan Pemegang Saham; 2. Struktur organisasi telah disusun dengan memperhatikan penerapan tata kelola yang baik dan kompleksitas usaha BPR. Namun demikian belum dibentuknya Komite Dewan Komisaris yaitu Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi, yang akan dilengkapi saat proses konsolidasi; 3. Secara umum Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain. Namun terdapat beberapa temuan pemeriksaan OJK yang masih dalam proses tindak lanjut; 4. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Telah terdapat kertas kerja yang digunakan untuk memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR dan telah dilaksanakan secara cukup efektif; 5. Anggota SKAI sudah ada yang memiliki Sertifikat dari LSP Certif di bidang Jasa Pengelola Keuangan Pada Unit Kompetensi Okupasi Auditor dan dinyatakan Kompeten. Sedangkan anggota SKAI yang belum memiliki sertifikasi kompetensi auditor diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan tentang auditor intern.



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah
Telepon: 0273 322214 - 0273 322747
Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

Wonogiri, 23 Januari 2026

PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)



ANDRE WAHYU YUDHANTORO, S.E., M.M
Komisaris Utama

Menyetujui



SARTI, S.E., M.M
Direktur Utama



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola
PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Semester II Tahun 2025**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/ SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) selama semester II tahun 2025. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Wonogiri, 23 Januari 2026

PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)



ANDRE WAHYU YUDHANTORO, S.E., M.M
Komisaris Utama

Menyetujui



SARTI, S.E., M.M
Direktur Utama



KERTAS KERJA LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SEMESTER II TAHUN 2025

Faktor 1. Aspek Pemegang Saham

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah Terpenuhi	Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah Terpenuhi	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS telah tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Baik	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris dilaksanakan melalui rapat baik secara tatap muka maupun melalui zoom meeting minimal setiap bulan sekali.
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Baik	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris dilakukan secara aktif maupun pasif minimal satu kali sebulan.
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Baik	Penilaian terhadap indikator dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, dimana sampai dengan bulan laporan setoran modal dari pemegang saham sebesar 28,07%.
6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Sangat Baik	Pemegang saham telah memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, melalui penilaian Pihak Independen yang kompeten di bidangnya.



7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Baik	Pengambilan keputusan melalui RUPS telah memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Baik	Pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil. Dalam pelaksanaan aksi korporasi, perlakuan yang adil di antaranya dalam hal pembagian Deviden yang dilaksanakan secara proporsional berdasarkan setoran modal
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Baik	Perkembangan kinerja BPR telah sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya. Hal ini ditunjukkan hasil kinerja keuangan BPR memenuhi seluruh target yang ditetapkan dalam RUPS.
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Sangat Baik	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris melalui penilaian dari Pihak Independen yang kompeten dibidangnya.
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Baik	Penggunaan laba dan pembagian dividen telah memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		7 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		0 Indikator	



Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 1. Aspek Pemegang Saham
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/ atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Sebagian besar pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang- undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian besar terealisasi yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR. c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian besar pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS telah tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif dalam penerapan tata kelola.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Pelaksanaan komunikasi terkait visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris dinilai baik 2. Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris dilakukan minimal satu kali sebulan sehingga dinilai baik. 3. Penilaian terhadap indikator dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, yang dimiliki BPR adalah baik. 4. Pemegang saham telah memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dengan penilaian sangat baik. 5. Pengambilan keputusan melalui RUPS telah memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang



	saham.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil. Dalam pelaksanaan aksi korporasi, perlakuan yang adil diantaranya dalam hal pembagian Dividen yang dilaksanakan secara proporsional berdasarkan setoran modal. 2. Perkembangan kinerja BPR telah sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya. 3. Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. 4. Penggunaan laba dan pembagian dividen telah memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Telah Terpenuhi	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan berjumlah 3 orang yaitu Direktur Utama, Direktur Pemasaran, dan Direktur Umum dan Kepatuhan. Direktur Umum dan Kepatuhan bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (YMFK).
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan 1.Sarti., S.E.,M.M sebagai Direktur Utama bertempat tinggal di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri. 2. Joko Santoso.,S.E sebagai Direktur Pemasaran bertempat tinggal di Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri. 3. Yani Harmini.,SP sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan bertempat tinggal di Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Seluruh anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank, dan/ atau lembaga lain (Partai Politik atau Organisasi Kemasyarakatan)
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Telah Terpenuhi	Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Telah Terpenuhi	Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yaitu Peraturan Direksi Nomor 03/ IV/ Per.Dir/2025 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang memuat tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan prosedur pengambilan keputusan Direksi.



7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Telah Terpenuhi	<i>Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR yaitu Peraturan Direksi Nomor 01/ I/ Per.Dir/2024 Tentang SOP Remunerasi</i>
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	<i>Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</i>



B. Proses Penerapan Tata Kelola			
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Baik	Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, Masing-masing Direksi menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan Peraturan Direksi tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi..
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Baik	Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi. Untuk melaksanakan hal tersebut telah dilengkapi dengan kebijakan direksi tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik, penerapan manajemen risiko, penerapan strategi anti fraud, pemisahan tugas tanggungjawab dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris dan Komite, serta kebijakan direksi lain sebagai pedoman dalam pengelolaan perusahaan.
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain.	Cukup Baik	Secara umum Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain. Namun terdapat beberapa temuan pemeriksaan OJK yang masih dalam proses tindak lanjut yaitu: a. Pengisian jabatan komisaris independen dalam proses penjaringan dan menunggu arahan dari Pemegang Saham b. BPR akan melengkapi struktur komite pada saat konsolidasi.
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Baik	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Baik	Dalam pengambilan keputusan, Direksi selalu berpedoman pada tata tertib kerja Direksi dengan melaksanakan musyawarah bersama seluruh anggota Direksi dan memperhatikan arahan dari Dewan Komisaris. Dalam hal diperlukan hasil musyawarah dapat mempertimbangkan masukan dari Pejabat Eksekutif.



15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Baik	Setiap kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi telah memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Sangat Baik	Direksi tidak menggunakan Perusahaan untuk kepentingan pribadi. Segala remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi sesuai dengan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah. 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan. 3. Pemberian Remunerasi dan Fasilitas lainnya tersebut ditetapkan berdasarkan RUPS.
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Baik	Direksi mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan baik yang diselenggarakan oleh OJK, Perbarindo, Perbamida maupun lembaga lain. Direksi juga menyelenggarakan pendidikan dan sosialisasi kebijakan secara mandiri yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Di samping itu Direksi juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Pengurus dan Pejabat Eksekutif setiap sebulan sekali, untuk membagikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, pada seluruh tingkatan atau jenjang, dan semua kegiatan tersebut didokumentasikan dengan baik.



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Baik	Direksi mengungkapkan: a. tidak memiliki saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; b. tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR,
20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Baik	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Baik	Direksi telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, terakhir dilakukan pengkinian dengan Peraturan Direksi Nomor 03/ IV/ Per.Dir/2025 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Baik	Direksi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, yaitu Peraturan Direksi Nomor 01/I/Per.Dir/2024 Tentang SOP Remunerasi. Secara berkala Direksi melakukan Perubahan struktur Gaji/ Penghasilan Pegawai dengan Surat Keputusan Direksi.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Sangat Baik	Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Cukup Baik	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala teknis misalnya penanganan kredit bermasalah yang belum sesuai dengan target.
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Baik	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Baik	Hasil rapat Direksi didokumentasikan dalam bentuk Notulen dan diarsipkan. Dissenting Opinion (perbedaan pendapat) sejauh ini belum ada, sedangkan jika ada perbedaan pendapat dalam rapat, selalu dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat.



27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Baik	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan tercapainya semua komponen RBB, dan terdapat penurunan NPL sebesar 0,94% menjadi 8,60% dari semester sebelumnya 9,54%.
28	Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak- pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		9 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		15 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 2 (Memadai)	



Kesimpulan Penilaian Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik. c. Direksi telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan yang bersifat administratif.	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan berjumlah 3 orang yaitu Direktur Utama, Direktur Pemasaran, dan Direktur Umum dan Kepatuhan. Direktur Umum dan Kepatuhan bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (YMFK). 2. Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan a.Sarti., S.E.,M.M sebagai Direktur Utama bertempat tinggal di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri. b. Joko Santoso.,S.E sebagai Direktur Pemasaran bertempat tinggal di Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri. c. Yani Harmini.,SP sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan bertempat tinggal di Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri. 3. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank, dan/atau lembaga lain (Partai Politik atau Organisasi Kemasyarakatan) 4. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris 5. Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, Masing-masing Direksi menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan Peraturan Direksi tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.. 2. Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan



	secara terintegrasi. Untuk melaksanakan hal tersebut telah dilengkapi dengan kebijakan direksi tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik, penerapan manajemen risiko, penerapan strategi anti fraud, pemisahan tugas tanggungjawab dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris dan Komite, serta kebijakan direksi lain sebagai pedoman dalam pengelolaan perusahaan. 3. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris. 4. Dalam pengambilan keputusan, Direksi selalu berpedoman pada tata tertib kerja Direksi dengan melaksanakan musyawarah bersama seluruh anggota Direksi dan memperhatikan arahan dari Dewan Komisaris. Dalam hal diperlukan hasil musyawarah dapat mempertimbangkan masukan dari Pejabat Eksekutif. 5. Setiap kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi telah memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2)	Faktor Negatif
	Secara umum Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain. Namun terdapat beberapa temuan pemeriksaan OJK yang masih dalam proses tindak lanjut yaitu: a. Pengisian jabatan komisaris independen dalam proses penjaringan dan menunggu arahan dari Pemegang Saham b. BPR akan melengkapi struktur komite pada saat konsolidasi.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. 2. Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. 3. Hasil rapat Direksi didokumentasikan dalam bentuk Notulen dan diarsipkan. Dissenting Opinion (perbedaan pendapat) sejauh ini belum ada, sedangkan jika ada perbedaan pendapat dalam rapat, selalu dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat. 4. Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan tercapainya semua komponen RBB, dan terdapat penurunan NPL sebesar 0,94% menjadi 8,60% dari semester sebelumnya 9,54%. 5. Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak- pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
2)	Faktor Negatif
	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala teknis misalnya penanganan kredit bermasalah yang belum sesuai dengan target.



Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Belum Terpenuhi	Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris belum sesuai dengan ketentuan yaitu paling sedikit 3 (tiga) orang. Saat ini BPR hanya memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan salah satunya menjabat sebagai Komisaris Utama. Sehingga masih terdapat kekosongan yaitu jabatan Komisaris Independen dikarenakan mengundurkan diri. Saat ini BPR sedang dalam proses konsolidasi sehingga pengisian Komisaris Independen menunggu arahan dari Pemegang Saham
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Sesuai dengan ketentuan, semua Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan: a. Andre Wahyu Yudhantoro, S.E.,M.M Sebagai Komisaris Utama bertempat tinggal di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. b. FX Pranata A.P.,M.Hum Sebagai Komisaris bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat, yang tertuang dalam Peraturan Dewan Komisaris Nomor 01/ XII/ Per.Dekom- WNG/2025 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS lainnya. Dewan Komisaris tidak merangkap Jabatan sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR/ BPRS dan/atau Bank Umum.
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama Anggota Dewan Komisaris atau Direksi.
6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Belum Terpenuhi	Terdapat kekosongan Komisaris Independen dikarenakan mengundurkan diri. Saat ini BPR sedang dalam proses konsolidasi sehingga pengisian Komisaris Independen menunggu arahan dari Pemegang Saham.



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Telah Terpenuhi	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan diangkat melalui RUPS-LB : 1. Andre Wahyu Yudhantoro, S.E.,M.M, berdasarkan Surat Kepala OJK Nomor S-220/ KO.0301/2023/2023 Tanggal 30 Maret 2023 hal Keputusan persetujuan atas pencalonan Dewan Komisaris (komisaris utama) PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) dan Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-17/ KO.0301/2023 Tanggal 29 Maret 2023Tentang kasil penilaian kemampuan dan kepatutan Sdr Andre Wahyu Yudhantoro, S.E,M.M selaku calon Komisaris Utama PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Kabupaten Wonogiri serta Pengangkatan sebagai Komisaris Utama berdasarkan RUPSLB Tanggal 5 April 2023 dengan masa jabatan tanggal 26 April 2023 sd 26 April 2027 dan telah dilaporkan ke OJK melalui APOLO. 2. Saudara FX Pranata A.P,M.Hum berdasarkan Surat Kepala OJK Nomor S-37/ KO.0301/2023 Tanggal 10 Januari 2023 hal Keputusan atas Pencalonan Anggota Dewan Komisaris PT BPR BKK Wonogiri (Perseroda) dan Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-02/ KO.0301/2023 tanggal 10 Januari 2023 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr FX Pranata selaku Calon Anggota Dewan Komisaris (Komisaris) PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) dan berdasarkan RUPSLB Nomor 63 tanggal 24 Januari 2023 dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 24 Januari 2023 sd 24 Januari 2027 dan telah dilaporkan ke OJK melalui APOLO.
8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	Kabijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Baik	<i>Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.</i>
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Baik	<i>Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan</i>
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Sangat Baik	<i>Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.</i>
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Baik	<i>Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain). Hasil pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan pemeriksaan disampaikan oleh Direksi pada rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat pengurus.</i>
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Baik	<i>Dewan Komisaris secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR. Permasalahan kinerja dan hal-hal operasional yang lain disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris dalam rapat pengurus minimal sebulan sekali.</i>
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Baik	<i>Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, terakhir dilakukan evaluasi pada bulan Desember tahun 2025.</i>



15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Baik	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Baik	Dewan Komisaris melaksanakan rapat rutin dengan Direksi secara berkala dalam upaya pemantauan kinerja Direksi dan dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan komisaris dimana pada semester 2 Tahun 2025 mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali.
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Sangat Baik	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Baik	Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan tugas Direksi dan telah memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Baik	Dewan Komisaris telah mengajukan kepada RUPS, terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah ditetapkan dengan RUPS- LB tanggal 29 November 2024
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Baik	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan baik
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Baik	Dewan Komisaris secara berkala telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Baik	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Baik	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.



24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Sangat Baik	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.
25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	Dewan Komisaris dalam menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Baik	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan tercapainya semua komponen RBB, dan terdapat penurunan NPL sebesar 0,94 % menjadi 8,60% dari semester sebelumnya 9,54%.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		6 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		2 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Sebagian	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		15 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 4 (Kurang Memadai)	



Kesimpulan Penilaian Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris
Nilai Faktor
Nilai 4 (Kurang Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Terdapat kekosongan jabatan Komisaris Independen sehingga ketentuan jumlah anggota Dewan Komisaris tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya jumlah anggota Dewan Komisaris tidak menyebabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan kurang baik. Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham. Hal ini tercermin dari hasil kinerja perusahaan sampai dengan tutup buku tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup memuaskan dimana semua komponen keuangan dapat tercapai secara maksimal, tidak terdapat fraud, penerapan tata kelola, dan manajemen risiko pada perusahaan berjalan baik. b. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris dengan ruang lingkup sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan baik. c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, dan terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. d. Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan remunerasi dan nominasi dengan ruang lingkup sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Sesuai dengan ketentuan, semua Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan: 2. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat, yang tertuang dalam Peraturan Dewan Komisaris Nomor 01/ XII/ Per.Dekom-WNG/2025 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. 3. Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS lainnya. Dewan Komisaris tidak merangkap Jabatan sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR/BPRS dan/atau Bank Umum. 4. Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama Anggota Dewan Komisaris atau Direksi. 5. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan diangkat melalui RUPS-LB.
2)	Faktor Negatif
	1. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris belum sesuai dengan ketentuan yaitu paling sedikit 3 orang. Saat ini BPR hanya memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan salah satunya menjabat sebagai Komisaris Utama. Sehingga masih terdapat kekosongan yaitu jabatan Komisaris Independen dikarenakan mengundurkan diri. Saat ini BPR sedang dalam proses konsolidasi sehingga pengisian Komisaris Independen menunggu arahan dari Pemegang Saham. 2. Terdapat kekosongan Komisaris Independen dikarenakan mengundurkan diri. Saat ini sedang dalam proses rekrutmen dan menunggu arahan dari Pemegang Saham
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.



	2. Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan 3. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. 4. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain). Hasil pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan pemeriksaan disampaikan oleh Direksi pada rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat pengurus. 5. Dewan Komisaris secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR. Permasalahan kinerja dan hal-hal operasional yang lain disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris dalam rapat pengurus minimal sebulan sekali.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. 2. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. 3. Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran. 4. Dewan Komisaris dalam menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. 5. Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan tercapainya semua komponen RBB, dan terdapat penurunan NPL sebesar 0,94 % menjadi 8,60% dari semester sebelumnya 9,54%.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sebagian Terpenuhi	BPR telah memiliki komite Direksi yaitu Komite Kredit, Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan Satuan Kerja audit Intern. Sedangkan komite Dewan Komisaris sebagian telah terpenuhi yaitu Komite Pemantau Risiko. Pemenuhan Komite Dewan Komisaris akan dilaksanakan saat proses konsolidasi PT BPR BKK (Perseroda) se Jawa Tengah
2	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing- masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing- masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu Peraturan Direksi Nomor 05/ V/ Per.Dir/2025 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Baik	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit,
4	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	Tidak Baik	Pembentukan komite audit akan dilaksanakan pada saat proses konsolidasi PT BPR BKK (Perseroda) se Jawa Tengah
5	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	Baik	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.
6	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Tidak Baik	Pembentukan komite remunerasi dan nominasi akan dilaksanakan pada saat proses konsolidasi PT BPR BKK (Perseroda) se Jawa Tengah



7	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Baik	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, dengan pencapaian baik.</i>
8	Masing- masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	Baik	<i>Masing- masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.</i>

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

9	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	Baik	<i>Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan Komite Kredit memberikan rekomendasi kepada Direksi terhadap pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.</i>
10	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	Cukup Baik	<i>Komite pemantau risiko telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait fungsi manajemen risiko dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris. Tetapi BPR belum membentuk komite dewan komisaris yang lain.</i>
11	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Baik	<i>Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.</i>

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Sebagian

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	6 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	2 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik



Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 4 (Kurang Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
Nilai Faktor
Nilai 4 (Kurang Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Direksi telah membentuk Komite Direksi meliputi SKAI (berfungsi sebagai komite audit intern), SKKMR (berfungsi sebagai komite pemantau risiko) dan Komite Kredit (berfungsi memantau dan mengevaluasi permohonan kredit). Masing masing komite Direksi telah menjalankan fungsi tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan dan tata tertib kerja masing-masing Komite. Dewan Komisaris baru memiliki Komite Pemantau Risiko, sedangkan Komite audit Intern dan Komite Remunerasi dan Nominasi belum terbentuk. Pemenuhan komite Dewan Komisaris akan dilaksanakan setelah proses konsolidasi selesai. Meskipun secara struktur Komite Dewan Komisaris belum terbentuk namun proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Sebagai gambaran fungsi komite Direksi maupun Komite Dewan Komisaris telah berjalan dengan baik antara lain: a. Masing-masing komite memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. b. Masing-masing komite telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite dengan ruang lingkup sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu Peraturan Direksi Nomor 05/V/Per.Dir/2025 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite.
2)	Faktor Negatif
	BPR telah memiliki komite Direksi yaitu Komite Kredit, Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Intern. Sedangkan komite Dewan Komisaris sebagian telah terpenuhi yaitu Komite Pemantau Risiko. Pemenuhan Komite Dewan Komisaris akan dilaksanakan saat proses konsolidasi PT BPR BKK (Perseroda) se Jawa Tengah
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit, 2. Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko. 3. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, dengan pencapaian baik. 4. Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.
2)	Faktor Negatif
	1. Pembentukan komite audit akan dilaksanakan pada saat proses konsolidasi PT BPR BKK (Perseroda) se Jawa Tengah 2. Pembentukan komite remunerasi dan nominasi akan dilaksanakan pada saat proses



	konsolidasi PT BPR BKK (Perseroda) se Jawa Tengah
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan Komite Kredit memberikan rekomendasi kepada Direksi terhadap pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi. 2. Komite pemantau risiko telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait fungsi manajemen risiko dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris. Tetapi BPR belum membentuk komite dewan komisaris yang lain. 3. Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Telah Terpenuhi	BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 09/ XII/ Per.Dir/2025 tentang Penanganan Benturan Kepentingan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Baik	Belum pernah terjadi benturan kepentingan dalam operasional Perusahaan, namun dalam hal terjadi benturan kepentingan, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pegawai tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Baik	Belum pernah terjadi benturan kepentingan dalam operasional BPR, namun dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Baik	Di semester 2 tahun 2025 tidak ada benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Perusahaan.
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Baik	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:			1 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:			0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:			Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:			4 Indikator



Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR telah memiliki dan menginisikan kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup memadai, serta berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik sesuai dengan kebijakan. b. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan ditangani dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan sangat baik. c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara baik.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 09/ XII/ Per.Dir/2025 tentang Penanganan Benturan Kepentingan.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	Belum pernah terjadi benturan kepentingan dalam operasional Perusahaan, namun dalam hal terjadi benturan kepentingan, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pegawai tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Belum pernah terjadi benturan kepentingan dalam operasional BPR, namun dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan



	pegawai tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. 2. Di semester 2 tahun 2025 tidak ada benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Perusahaan. 3. BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR sudah memiliki Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama, tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana dan mampu bekerja secara independen.
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah dibentuk sejak bulan Agustus 2019 yang bekerja secara independen terhadap operasional Perusahaan.
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Telah Terpenuhi	Satuan Kerja Kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan berupa Peraturan Direksi Nomor 43/ VI/ Per.Dir/2020 Tentang Pedoman Penerapan Fungsi Kepatuhan.
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Telah Terpenuhi	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. Ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, termuat dalam Peraturan Direksi No 06/Per.Dir/III/2024 Tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan Tata Kerja Pegawai
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Baik	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.



6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Baik	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Telah terdapat kertas kerja yang digunakan untuk memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR dan telah dilaksanakan secara efektif.
7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Baik	Ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, termuat dalam Peraturan Direksi No 06/ Per.Dir/ III/2024 Tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan Tata Kerja Pegawai

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	Baik	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan dari tahun sebelumnya.
9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	5 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik



Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 2 (Memadai)
Kesimpulan Penilaian Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan		
Nilai Faktor		
Nilai 2 (Memadai)		
Penjelasan Nilai Faktor		
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan berhasil menurunkan tingkat pelanggaran. b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki dan/atau melakukan pengkinian pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.		
No	Analisa Faktor Positif dan Negatif	
A. Struktur dan Infrastruktur		
1)	Faktor Positif	
	1. BPR sudah memiliki Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama, tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana dan mampu bekerja secara independen. 2. Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah dibentuk sejak bulan Agustus 2019 yang bekerja secara independen terhadap operasional Perusahaan. 3. Satuan Kerja Kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan berupa Peraturan Direksi Nomor 43/ VI/Per.Dir/2020 Tentang Pedoman Penerapan Fungsi Kepatuhan. 4. BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. Ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, termuat dalam Peraturan Direksi No 06/Per.Dir/III/2024 Tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan Tata Kerja Pegawai	
2)	Faktor Negatif	
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.	
B. Proses Penerapan Tata Kelola		
1)	Faktor Positif	
	1. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. 2. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Telah terdapat kertas kerja yang digunakan untuk memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR dan telah dilaksanakan secara efektif. 3. Ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, termuat dalam Peraturan Direksi No 06/Per.Dir/III/2024 Tentang	



	Kedudukan, Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan Tata Kerja Pegawai
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan dari tahun sebelumnya. 2. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggungjawab terhadap fungsi Audit Intern,
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi Auditor Intern sesuai peraturan perundang- undangan dan telah disetujui Direktur Utama dan Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 15/ II/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern.
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Telah Terpenuhi	Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, independen terhadap satuan kerja operasional. Hal ini tercermin dari Struktur Organisasi dimana SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan tidak merangkap jabatan dengan Satuan Kerja Operasional lainnya, serta tidak ada perintah kerja dari Direksi untuk melaksanakan fungsi operasional.
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Telah Terpenuhi	Sebagaimana dalam Struktur Organisasi yang sudah ditetapkan, SKAI yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Telah Terpenuhi	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Baik	Perusahaan sudah menerapkan, aspek dan unsur kegiatan audit intern sebagaimana ketentuan antara lain: a. Perencanaan audit tahunan b. Penunjukan tenaga audit c. Rencana audit d. Strategi audit e. Pelaksanaan audit f. Konfirmasi hasil audit g. Pembahasan hasil audit h. Monitoring dll.



7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	Sangat Baik	Telah dilaksanakan kaji ulang dari pihak ekstern atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern periode tahun 2022 dan telah dilaporkan kepada OJK dengan penilaian secara umum telah memenuhi fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab SKAI.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Baik	Pelaksanaan audit intern sudah melalui tahap-tahap yang mencakup : a. Persiapan Audit. b. Penyusunan Program Audit. c. Pelaksanaan Audit. d. Pelaporan Hasil Audit. Tindak lanjut pasca audit telah dipantau sesuai komitmen auditee
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	Cukup Baik	Anggota SKAI sudah ada yang memiliki Sertifikat dari LPS PRATAMA di bidang Jasa Pengelola Keuangan Pada Unit Kompetensi Okupasi Auditor dan dinyatakan Kompeten. Sedangkan anggota SKAI yang belum memiliki sertifikasi kompetensi auditor diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan tentang auditor intern.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup Baik	Satuan kerja audit intern telah menyusun audit program sebelum melakukan pemeriksaan ke unit atau satuan kerja yang akan dijadikan obyek audit (auditee).
11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu.	Baik	Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, selalu menyampaikan Laporan Pelaksanaan Audit Intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, serta menyampaikan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	5 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	3 Indikator



Indikator dengan nilai Cukup Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Satuan kerja audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. Satuan kerja audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggungjawab terhadap fungsi Audit Intern, 2. Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi Auditor Intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui Direktur Utama dan Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 15/ II/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern. 3. Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, independen terhadap satuan kerja operasional. Hal ini tercermin dari Struktur Organisasi dimana SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan tidak merangkap jabatan dengan Satuan Kerja Operasional lainnya, serta tidak ada perintah kerja dari Direksi untuk melaksanakan fungsi operasional. 4. Sebagaimana dalam Struktur Organisasi yang sudah ditetapkan, SKAI yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. 5. BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Perusahaan sudah menerapkan, aspek dan unsur kegiatan audit intern sebagaimana ketentuan antara lain: a. Perencanaan audit tahunan b. Penunjukan tenaga audit c. Rencana audit d. Strategi audit e. Pelaksanaan audit f. Konfirmasi hasil audit g. Pembahasan hasil audit h.



	Monitoring dll. 2. Telah dilaksanakan kaji ulang dari pihak ekstern atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern periode tahun 2022 dan telah dilaporkan kepada OJK dengan penilaian secara umum telah memenuhi fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab SKAI. 3. Pelaksanaan audit intern sudah melalui tahap-tahap yang mencakup : a. Persiapan Audit. b. Penyusunan Program Audit. c. Pelaksanaan Audit. d. Pelaporan Hasil Audit. Tindak lanjut pasca audit telah dipantau sesuai komitmen auditee
2)	Faktor Negatif
	Anggota SKAI sudah ada yang memiliki Sertifikat dari LSP PRATAMA di bidang Jasa Pengelola Keuangan Pada Unit Kompetensi Okupasi Auditor dan dinyatakan Kompeten. Sedangkan anggota SKAI yang belum memiliki sertifikasi kompetensi auditor diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan tentang auditor intern.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, selalu menyampaikan Laporan Pelaksanaan Audit Intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, serta menyampaikan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2)	Faktor Negatif
	Satuan kerja audit intern telah menyusun audit program sebelum melakukan pemeriksaan ke unit atau satuan kerja yang akan dijadikan obyek audit (auditee).



Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Telah Terpenuhi	Penugasan Audit kepada kantor KAP Ruchendi, Marjito, Rushadi dan Rekan untuk melakukan Audit atas laporan keuangan Perusahaan tahun 2025, tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Audit Atas Laporan Keuangan PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Nomor 025.293/ KAP.RMR/ SP/ XI/2025 Dan KP-01/68/ PKS/ XI/2025 dengan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan SE OJK No.36/ SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Dalam melaksanakan pekerjaannya KAP menggunakan Standar Profesional Akuntan Publik, serta apabila pemeriksaan telah selesai akan menyampaikan laporan hasil audit dan Management Letter kepada Perusahaan serta OJK.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Sangat Baik	KAP Ruchendi, Marjito, Rushadi dan Rekan berdasar persetujuan RUPS tanggal 17 November 2025 ditunjuk untuk melakukan audit laporan keuangan tahun 2025. KAP Ruchendi, Marjito, Rushadi dan Rekan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan : 1. Akuntan Publik dengan Nomor Register AP No. 0182. 2. Nomor Surat Tanda Terdaftar Akuntan Publik: STTD.AP00004/ PB.122/2017. 3. Nomor Surat Tanda Terdaftar Kantor Akuntan Publik: STTD.KAP00020/PM.22/2017.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Baik	Audit KAP posisi laporan tahun 2025 masih proses dilakukan oleh KAP Ruchendi, Marjito, Rushadi dan Rekan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Baik	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sangat Baik	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, hasil audit telah menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR.	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Penugasan Audit kepada kantor KAP Ruchendi, Marjito, Rushadi dan Rekan untuk melakukan Audit atas laporan keuangan Perusahaan tahun 2025, tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Audit Atas Laporan Keuangan PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Nomor 025.293/KAP.RMR/SP/XI/2025 Dan KP-01/68/PKS/XI/2025 dengan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan SE OJK No.36 / SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Dalam melaksanakan pekerjaannya KAP menggunakan Standar Profesional Akuntan Publik, serta apabila pemeriksaan telah selesai akan menyampaikan laporan hasil audit dan Management Letter kepada Perusahaan serta OJK.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. KAP Ruchendi, Marjito, Rushadi dan Rekan berdasar persetujuan RUPS tanggal 17 November 2025 ditunjuk untuk melakukan audit laporan keuangan tahun 2025. KAP Ruchendi, Marjito, Rushadi dan Rekan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan : 2. Akuntan Publik dengan Nomor Register AP No. 0182. 3. Nomor Surat Tanda Terdaftar Akuntan Publik: STTD.AP00004/PB.122/2017. 4. Nomor Surat Tanda Terdaftar Kantor Akuntan Publik: STTD.KAP00020/PM.22/2017. 5. Audit KAP posisi laporan tahun 2025 masih proses dilakukan oleh KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi dan Rekan.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas. 2. Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko sudah dibentuk sejak bulan Agustus 2019 yang bekerja Independen terhadap operasional BPR yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2	BPR memiliki dan mengingkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	Telah Terpenuhi	Perusahaan telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 63/ VIII/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko. Untuk Penetapan Limit Risiko tertuang dalam Surat Edaran Direksi Nomor KP-01/13/X/SE/2025 Tentang Tingkat Risiko (Risk Appetite) dan Toleransi Risiko (Risk Tolerance).
3	BPR memiliki dan mengingkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Telah Terpenuhi	Perusahaan telah memiliki kebijakan dan Prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 63/ VIII/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

5	Direksi:a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Baik	<i>Direksi telah menyusun kebijakan dan Pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 63/ VIII/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</i>
6	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Baik	<i>Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yaitu Peraturan Direksi Nomor 63/ VIII/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</i>
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	Baik	<i>BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko di antaranya proses persetujuan kredit mempertimbangkan pendapat Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko (SKKMR), mempelajari dan mengevaluasi Laporan Profil Risiko dari SKKMR serta dalam hal penerbitan produk baru mempertimbangkan faktor- faktor risiko yang mempengaruhi produk baru tersebut.</i>
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	Baik	<i>BPR telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.</i>



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR telah menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APU, PPT, dan PPPSPM) dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain saat melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah selalu dilakukan CDD
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan antara lain mendeteksi secara dini gaya hidup dan aktifitas transaksi keuangan seluruh pegawai secara berkala.
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	Baik	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh dengan cara melakukan pemantauan terhadap kemungkinan risiko yang akan terjadi diantaranya dengan melakukan perbaikan/ pengkinian SOP, sosialisasi penerapan manajemen risiko kepada seluruh pegawai dan penilaian profil risiko terhadap masing- masing jenis risiko secara berkala.
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR telah berupaya menerapkan Manajemen Risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana laporan profil risiko yang telah disampaikan ke OJK. Perusahaan cukup mampu melakukan pengendalian Risiko dengan kondisi sebagai berikut: 1. Risiko kredit, terjadi penurunan NPL dan KKR dari semester sebelumnya. 2. Risiko likuiditas, selalu memantau cash rasio setiap hari dan memastikan selalu dalam kondisi sehat, 3. Risiko operasional, masih terdapat kelemahan terutama proses pengikatan agunan. 4. Risiko kepatuhan, masih adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku antara lain kekurangan pembayaran pajak dan denda keterlambatan pembayaran pajak. 5. Risiko reputasi, terkelola dengan baik, dalam semester 2 tahun 2025 tidak terdapat pemberitaan negatif mengenai BPR. Terdapat 1 pengaduan nasabah namun telah diselesaikan dengan baik. 6. Risiko stratejik, pencapaian RBB semester 2 tahun 2025 semua komponen telah tercapai



13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Baik	Perusahaan telah mempunyai sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh dengan mempergunakan jasa vendor PT USSI PINBUK PRIMA SOFTWARE sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor KP-01/20/ IV/ PKS/2025 dan Nomor 022/PKS/USSI/IV/2025.
14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Baik	Direksi telah melakukan upaya pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi di antaranya melalui pembinaan, sosialisasi, dan pelatihan- pelatihan berkaitan dengan manajemen risiko termasuk mengirim Pejabat Struktural untuk mengikuti pendidikan bersertifikasi Manajemen Risiko secara bertahap.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	Baik	BPR telah menyusun dan melaporkan Laporan Profil Risiko Setiap Semester kepada OJK, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	Baik	BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	14 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator



Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga: 1) peringkat risiko rendah; 2) tidak terdapat fraud; dan/ atau 3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah. b. BPR telah memiliki dan menginisikan pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut c. Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian besar jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko sudah dibentuk sejak bulan Agustus 2019 yang bekerja Independen terhadap operasional BPR yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2. Perusahaan telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 63/VIII/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko. Untuk Penetapan Limit Risiko tertuang dalam Surat Edaran Direksi Nomor KP-01/13/ X/ SE/2025 Tentang Tingkat Risiko (Risk Appetite) dan Toleransi Risiko (Risk Tolerance). 3. Perusahaan telah memiliki kebijakan dan Prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 63/ VIII/Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas



	Jasa Keuangan. 2. Direksi telah menyusun kebijakan dan Pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 63/VIII/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. 3. Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yaitu Peraturan Direksi Nomor 63/VIII/Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. 4. BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko di antaranya proses persetujuan kredit mempertimbangkan pendapat Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko (SKKMR), mempelajari dan mengevaluasi Laporan Profil Risiko dari SKKMR serta dalam hal penerbitan produk baru mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang mempengaruhi produk baru tersebut. 5. BPR telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah menyusun dan melaporkan Laporan Profil Risiko Setiap Semester kepada OJK, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik. 2. BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 3. BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Telah Terpenuhi	Perusahaan memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK yang dituangkan dalam Peraturan Direksi Nomor KP-01/09/ Per.Dir/XI/2023.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan.	Baik	Kebijakan, sistem, dan prosedur BMPK disusun dengan berpedoman pada POJK Nomor 23 Tahun 2022 yaitu Peraturan Direksi Nomor KP-01/09/ Per.Dir/ XI/2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit tanggal 27 November 2023.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Sangat Baik	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan kredit besar mengacu pada POJK tentang BMPK dan Peraturan Internal Perusahaan yaitu, Peraturan Direksi Nomor 17/ XI/ Per.Dir/2024 Tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sangat Baik	BPR tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		2 Indikator	



Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikakan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR. b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang- undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/ atau pelampauan BMPK dilakukan dengan segera. c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Perusahaan memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK yang dituangkan dalam Peraturan Direksi Nomor KP-01/09/Per.Dir/XI/2023.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Kebijakan, sistem, dan prosedur BMPK disusun dengan berpedoman pada POJK Nomor 23 Tahun 2022 yaitu Peraturan Direksi Nomor KP-01/09/ Per.Dir/ XI/2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit tanggal 27 November 2023. 2. Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan kredit besar mengacu pada POJK tentang BMPK dan Peraturan Internal Perusahaan yaitu, Peraturan Direksi Nomor 17/ XI/ Per.Dir/2024 Tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif



	1. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2. BPR tidak pernah melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Telah Terpenuhi	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	BPR telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Telah Terpenuhi	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan yaitu Peraturan Direksi Nomor 01/I/Per.Dir/2025 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank dan kebijakan dan prosedur terkait sistem teknologi informasi yaitu Peraturan Direksi Nomor 16/X/Per.Dir.2024
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Baik	BPR telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</i>
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>BPR telah menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</i>
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Baik	<i>Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.</i>

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Baik	<i>Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.</i>
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</i>
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Baik	<i>Pada semester 2 tahun 2025 terdapat 1 (satu) kasus pengaduan nasabah yang ditujukan untuk BPR, dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.</i>

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	9 Indikator



Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. BPR memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum. c. BPR telah memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur. d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, terdapat laporan pengaduan dari nasabah dan dapat ditindaklanjuti dengan segera.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. 2. BPR telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris. 3. BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan yaitu Peraturan Direksi Nomor 1/ I/ Per.Dir/2025 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank dan kebijakan dan prosedur terkait sistem teknologi informasi yaitu Peraturan Direksi Nomor 16/X/Per.Dir.2024
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi. 2. BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang



	saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 3. BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 4. BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 5. BPR telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 6. Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat. 2. Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 3. Pada semester 2 tahun 2025 terdapat 1 (satu) kasus pengaduan nasabah yang ditujukan untuk BPR, dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. 4. Telah dilakukan perbaikan terkait kelemahan penerapan teknologi informasi dalam rangka mendukung kegiatan operasional, tercermin dari telah dilakukan perbaikan core banking system diantaranya telah mengakomodir pelaksanaan APU, PPT dan PPPSPM.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 12. Rencana Bisnis BPR

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Telah Terpenuhi	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Telah Terpenuhi	Rencana bisnis BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Baik	Secara garis besar RBB disusun berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan. b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian. c. Penerapan Manajemen Risiko. Faktor-faktor tersebut diungkap dalam Ringkasan Eksekutif dan Strategi Bisnis dan Kebijakan Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan RBB, dilakukan setiap dilaksanakan rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat. Pengawasan secara pasif dilakukan dengan memantau perkembangan melalui laporan yang bisa diakses melalui sarana Teknologi Informasi.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Baik	Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan RBB dilakukan setiap dilaksanakan rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat. Pengawasan secara pasif dilakukan dengan memantau perkembangan melalui laporan yang bisa diakses melalui sarana Teknologi Informasi.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			



6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</i>
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Baik	<i>Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis telah tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.</i>

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 12. Rencana Bisnis BPR

Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian besar komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	



1)	Faktor Positif
	1. Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. 2. Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 3. Rencana bisnis BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Secara garis besar RBB disusun berdasarkan realisasi tahun tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan. b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip ke hati-hatian. c. Penerapan Manajemen Risiko. Faktor- faktor tersebut diungkap dalam Ringkasan Eksekutif dan Strategi Bisnis dan Kebijakan Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan RBB, dilakukan setiap dilaksanakan rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat. Pengawasan secara pasif dilakukan dengan memantau perkembangan melalui laporan yang bisa diakses melalui sarana Teknologi Informasi. 2. Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan RBB dilakukan setiap dilaksanakan rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat. Pengawasan secara pasif dilakukan dengan memantau perkembangan melalui laporan yang bisa diakses melalui sarana Teknologi Informasi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2. Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis telah tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.



Kesimpulan Akhir

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 2 (Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 2 (Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 4 (Kurang Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Nilai 4 (Kurang Memadai)
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 2 (Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 2 (Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 2 (Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 2 (Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 2 (Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 2 (Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 2 (Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 2 (Memadai)
Peringkat Komposit		2
Predikat Komposit		Baik

Kesimpulan
Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola antara lain belum terpenuhinya Komisaris Independen karena saat ini BPR sedang dalam proses Konsolidasi, namun secara umum kelemahan tersebut tidak mengurangi kualitas kerja Dewan Komisaris sehingga tidak berdampak signifikan yang mempengaruhi penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
Faktor Positif
- Aspek pemegang saham, pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil, perkembangan kinerja BPR telah sejalan dengan rencana strategis, dan tidak melakukan benturan kepentingan - Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemegang saham melalui RUPS. - Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian. - Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, Komite pemantau risiko telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait fungsi manajemen risiko dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris. - Penanganan benturan kepentingan, belum pernah terjadi benturan kepentingan dalam operasional Perusahaan. - Penerapan fungsi kepatuhan, Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR. - Penerapan fungsi audit internal, SKAI selalu menyampaikan Laporan Pelaksanaan Audit Intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. - Penerapan fungsi audit ekstern, hasil audit telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas. - Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud, BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. - Batas maksimum pemberian kredit, laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait



dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan ke OJK.

- 11. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.
- 12. Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan.

Faktor Negatif

- 1. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris belum sesuai dengan ketentuan yaitu paling sedikit 3 (tiga) orang. Saat ini masih terdapat kekosongan jabatan Komisaris Independen, saat ini sedang proses konsolidasi dan menunggu arahan Pemegang Saham;
- 2. Struktur organisasi telah disusun dengan memperhatikan penerapan tata kelola yang baik dan kompleksitas usaha BPR. Namun demikian belum dibentuknya Komite Dewan Komisaris yaitu Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi, yang akan dilengkapi saat proses konsolidasi;
- 3. Secara umum Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain. Namun terdapat beberapa temuan pemeriksaan OJK yang masih dalam proses tindak lanjut;
- 4. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Telah terdapat kertas kerja yang digunakan untuk memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR dan telah dilaksanakan secara cukup efektif;
- 5. Anggota SKAI sudah ada yang memiliki Sertifikat dari LSP Certif di bidang Jasa Pengelola Keuangan Pada Unit Kompetensi Okupasi Auditor dan dinyatakan Kompeten. Sedangkan anggota SKAI yang belum memiliki sertifikasi kompetensi auditor diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan tentang auditor intern.